



# LKjIP 2020

Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah

KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2021



## PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

# INSPEKTORAT

Jalan Graha Pancasila No. 02 Telepon (0253) 201168

e.mail [inspektorat@pandeglangkab.go.id](mailto:inspektorat@pandeglangkab.go.id) Web : <http://www.inspektorat.pandeglangkab.go.id>  
PANDEGLANG 42211

### PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pandeglang, 8 Maret 2021

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Drs. H. ISKANDAR, MM**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP.19630303 198402 1 001







## PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

# INSPEKTORAT

Jalan Graha Pancasila No. 02 Telepon (0253) 201168

e.mail [inspektorat@pandeglangkab.go.id](mailto:inspektorat@pandeglangkab.go.id) Web : <http://www.inspektorat.pandeglangkab.go.id>  
PANDEGLANG 42211

Pandeglang, 8 Maret 2021

Nomor : 700/663-LHR-INSP/2021.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang  
untuk Tahun Anggaran 2020.**

Kepada  
Yth. Bupati Pandeglang  
di  
**PANDEGLANG**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu  
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pandeglang.  
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.  
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
2. Dasar Reviu
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Pandeglang, Nomor:800/390P/2021 tanggal 01 Maret 2021.
3. Pelaksanaan Reviu.Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan 8 Maret 2021.
4. Tujuan dan Sasaran Reviu.Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.
5. Ruang Lingkup Reviu.Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

## 6. Simpulan dan Rekomendasi

### 6.1. Simpulan

#### 6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja /LKj) Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting IP berupa rencana, target dan pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis maupun hasil program/kegiatan

6.1.1.2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja yang sesuai dengan Penetapan Kinerja

6.1.1.3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai, namun masih terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- terdapat Indikator yang belum diukur antara lain Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Luar Panti Skala Provinsi
- terdapat Sasaran berupa Meningkatkan kualitas kawasan/destinasi wisata; Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat wisata; Meningkatkan manajemen pengelolaan obyek wisata, yang ketiganya memiliki indikator dan target yang sama tetapi berbeda realisasinya pada indikator PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya, dan PDRB ADHK Sektor Jasa lainnya

6.1.1.4. Laporan Kinerja disajikan dengan dilengkapi lampiran form pengukuran kinerja yang memadai untuk mendukung informasi pada badan laporan;

6.1.1.5. Laporan Kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;

6.1.1.6. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan (anggaran) yang terkait langsung dengan sasaran/program dan dilengkapi lampiran Realisasi APBD.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;

6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data yang memadai;

6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah memadai dilengkapi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);

6.1.2.4. Penanggungjawab pengumpulan data/informasi ditetapkan di setiap SKPD terkait/unit kerja;

6.1.2.5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum sepenuhnya dapat diyakini keandalan nya;

6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) belum seluruhnya diketahui oleh unit kerja terkait.



- 6.1.3 Subtansi Kesimpulan terhadap Subtansi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
  - 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan RPJMD;
  - 6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;
  - 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama dibuat secara formal;
  - 6.1.3.5. Terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat; namun untuk lebih lengkap dalam penyajian LKJIP perlu menginformasikan;
    - Informasi tentang Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun pelaporan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis/RPJMD
    - Informasi tentang Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, peningkatan/penurunan Kinerja
    - Informasi tentang Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  - 6.1.3.6. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi kriteria SMART namun masih terdapat pernyataan indikator Kinerja sasaran yang masih belum berorientasi outcome yaitu antara lain:
    - Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha provinsi/nasional
    - Fasilitasi Olahraga
    - Media Massa
    - Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional
    - Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal
    - Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang
    - Cakupan patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat
    - Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Luar Panti Skala Provinsi
  - 6.1.3.7. Belum seluruh sasaran strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang:

### 1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:

- Laporan Kinerja menyajikan capaian kinerja indikator IP yang belum diukur;
- Mengkonfirmasi kembali capaian kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata; Menguatnya SDM Pelaku/ masyarakat wisata; Meningkatnya manajemen pengelolaan obyek wisata terkait dengan indikator dan targetnya;

- Laporan Kinerja tidak hanya menyajikan menyajikan informasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai masing-masing sasaran yang ditetapkan tetapi juga realisasi biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan sasaran tersebut (cost per outcome).

### 2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:

- Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai;
- Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) agar diinformasikan kepada unit kerja terkait
- Agar diberikan analisis/penjelasan yang lebih rinci terkait dengan capaian kinerja yang tidak sesuai dengan target; dimana dalam Ikhtisar Eksekutif dinyatakan beberapa indikator kinerja tidak tercapai karena Pandemi Covid 19.

### 3. Dalam hal Subtansi, agar:

- Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang masih berorientasi output, agar diubah menjadi berorientasi outcome;
- LKJIP menginformasikan hal terkait;
  - Informasi tentang Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun pelaporan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis/RPJMD
  - Informasi tentang Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, peningkatan/penurunan Kinerja
  - Informasi tentang Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Demikian laporan hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

**Plt. INSPEKTUR  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Drs. H. ISKANDAR, MM**  
Pemula Utama Muda(IV/c)  
NIP. 19630303 198402 1 001



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai capaian kinerja tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2016 – 2021.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Pandeglang,                      Maret 2021

BUPATI PANDEGLANG

  
Hj. IRNA NARULITA, SE, MM



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 PENDAHULUAN	I-1-2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP	I-2
1.3 GAMBARAN UMUM	I-2
1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	I-20
1.5 SISTEMATIKA LKjIP 2020	I-24
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021	II-25
2.2 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	II-30
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG	III-66
3.2 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI	III-106
3.3 REALISASI ANGGARAN	III-114
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 KESIMPULAN	IV-118
4.2 SARAN	IV-120
 <b>LAMPIRAN</b>	
I. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	
II. REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	
III. PENGHARGAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017-2020	



**DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-4
TABEL 1.2	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-6
TABEL 1.3	INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2017	I-8
TABEL 1.4	KOMPOSISI PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2020	I-9
TABEL 1.5	ANGKA MELEK HURUF ( LATIN ) PENDUDUK USIA 10 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020	I-10
TABEL 1.6	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018-2020	I-11
TABEL 1.7	PRESENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DI TAMATKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-12
TABEL 1.8	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020	I-13
TABEL 1.9	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020	I-14
TABEL 1.10	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KOTOR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020	I-15
TABEL 1.11	JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID DAN RASIO MURID- GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-16
TABEL 1.12	JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016- 2017	I-18
TABEL 1.13	JUMLAH ANGKA KESAKITAN DAN RATA- RATA LAMANYA SAKIT PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018- 2020	I-18
TABEL 1.14	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH ( PNS ) DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-19
TABEL 1.13	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH ( PNS ) DI KABUPATEN BERDASARKAN PENDIDIKAN PANDEGLANG TAHUN 2020	I-19

TABEL 2.1	PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020	II-30
TABEL 3.10	TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020	III-68
TABEL 3.11	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI PERTAMA	III-107
TABEL 3.12	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEDUA	III-108
TABEL 3.13	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KETIGA	III-109
TABEL 3.14	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEEMPAT	III-110
TABEL 3.15	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KELIMA	III-111
TABEL 3.16	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEENAM	III-112
TABEL 3.17	CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI KABUPATEN PANDEGLANG	III-113
TABEL 3.18	TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020	III-115
TABEL 3.19	TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	III-116
TABEL 3.20	TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	III-117
TABEL 3.21	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020	III-117



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Pandeglang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Tata kelola pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Evaluasi perencanaan strategis setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun LKjIP tahun 2020 yang merupakan implementasi Sistem AKIP tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang diaktualisasikan dalam beberapa fungsi, urusan pemerintah daerah, program dan kegiatan. Fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 9 fungsi dan 33 urusan pemerintah daerah yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Umum, meliputi urusan pemerintahan daerah Perencanaan Pembangunan; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Statistik; Kearsipan; serta Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Ketentraman dan Ketertiban, meliputi urusan pemerintahan daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Fungsi Ekonomi, meliputi urusan pemerintah daerah Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; dan Perindustrian.
4. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi urusan pemerintah daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup dan Pertanahan.



5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, meliputi urusan pemerintah daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
6. Fungsi Kesehatan, meliputi urusan pemerintah daerah Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
7. Fungsi Pariwisata dan Budaya, meliputi urusan pemerintah daerah Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Fungsi Pendidikan, meliputi urusan pemerintah daerah Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Perpustakaan.
9. Fungsi Perlindungan Sosial, meliputi urusan pemerintah daerah Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Sosial.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan yang terhimpun dalam fungsi dan urusan pemerintahan daerah maka telah memberikan imbas berupa *outcome*/ manfaat terhadap pencapaian target kinerja tahun 2020 yang didasarkan/ dikelompokkan dengan kedekatan antara sasaran strategis dengan misi Kabupaten Pandeglang. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut sebagaimana uraian berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : 100,23 %
2. Membangun konektivitas wilayah: 116,27%
3. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian : 94,095%
4. Meningkatkan nilai tambah sektor maritim : 97,30%
5. Modernisasi pengelolaan potensi wisata : 59,02%
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah: 81,07%

Capaian dari masing-masing misi tersebut menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi tahun keempat yaitu **91,33%** dan masuk pada kategori "*memuaskan*".

Pencapaian kinerja pada tahun ke-empat periode 2016 - 2021 ada penurunan dari tahun 2019 yaitu **92,96 %**, ini dikarenakan ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, akibat dari keadaan pandemi Covid- 19 yang hendaknya menjadi bahan pendorong bagi jajaran pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mendukung proses pembangunan daerah serta lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Pada tahun yang akan datang, seiring dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, penataan akuntabilitas kinerja Sistem AKIP (SAKIP). Perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara konsekuen agar dapat bermanfaat, baik bagi perencanaan maupun pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 PENDAHULUAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja

dan perbandingan capaian indikator sasaran dengan demikian LKjIP Kabupaten Pandeglang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020 yang merupakan tahun keempat RPJMD Tahun 2016 – 2021.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP TAHUN 2020**

### **1.2.1. Maksud**

LKjIP Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2020 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan RPJMD .

### **1.2.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP ) antara lain :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang ,
- c. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

## **1.3 GAMBARAN UMUM**

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang memiliki andalan dibidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.

### **GEOGRAFIS**

Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km<sup>2</sup> atau sebesar 29,98% dari luas Propinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%).



- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pandeglang terbagi atas 35 Kecamatan, 326 Desa dan 13 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa  
Kabupaten Pandeglang,  
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	KECAMATAN SUMUR	7	-
2	KECAMATAN CIMANGGU	12	-
3	KECAMATAN CIBALIUNG	9	-
4	KECAMATAN CIKEUSIK	14	-
5	KECAMATAN CIGEULIS	9	-
6	KECAMATAN PANIMBANG	6	-
7	KECAMATAN MUNJUL	9	-
8	KECAMATAN ANGSANA	9	-
9	KECAMATAN PICUNG	9	-
10	KECAMATAN BOJONG	8	-
11	KECAMATAN SAKETI	14	-
12	KECAMATAN CISATA	9	-
13	KECAMATAN PAGELARAN	13	-
14	KECAMATAN PATIA	10	-
15	KECAMATAN LABUAN	9	-
16	KECAMATAN JIPUT	13	-
17	KECAMATAN CIKEDAL	10	-
18	KECAMATAN MENES	12	-
19	KECAMATAN MANDALAWANGI	15	-
20	KECAMATAN CIMANUK	11	-
21	KECAMATAN CIPEUCANG	10	-
22	KECAMATAN BANJAR	11	-
23	KECAMATAN KADUHEJO	10	-
24	KECAMATAN PANDEGLANG	-	4
25	KECAMATAN CADASARI	11	-
26	KECAMATAN KARANGTANJUNG	-	4
27	KECAMATAN CIBITUNG	10	-
28	KECAMATAN CARITA	9	-
29	KECAMATAN SUKARESMI	10	-
30	KECAMATAN MEKARJAYA	8	-
31	KECAMATAN SINDANGRESMI	9	-
32	KECAMATAN PULOSARI	9	-
33	KECAMATAN KORONCONG	12	-
34	KECAMATAN MAJASARI	-	5
35	KECAMATAN SOBANG	8	-

Sumber : Data BPS Pandeglang Dalam Angka 2020

## **TOPOGRAFI**

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini nampak dari terdapatnya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.

## **DEMOGRAFI**

Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2020 tercatat berjumlah 1.211.909 jiwa terdiri dari laki-laki 618.304 jiwa dan perempuan 593.605 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 427.835 KK, dengan penambahan penduduk dari Tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2.898 jiwa. Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2020 adalah 430 orang/ km<sup>2</sup> dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 92 orang/km<sup>2</sup> sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.622 orang/ km<sup>2</sup>, sementara Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2000-2020 rata-rata sebesar 0,72 persen per tahun.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai



penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

**Tabel 1.2**  
Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang,  
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
			LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	Sumur		12,242	11,964	24,206
2	Cimanggu		19,654	19,356	39,010
3	Cibaliung		15,803	14,860	30,663
4	Cibitung		11,457	11,029	22,486
5	Cikeusik		27,334	26,194	53,528
6	Cigeulis		18,239	17,439	35,678
7	Panimbang		26,493	25,265	51,758
8	Sobang		18,434	18,229	36,663
9	Munjul		11,820	11,431	23,251
10	Angsana		13,692	12,830	26,522
11	Sindangresmi		11,246	11,090	22,336
12	Picung		18,744	18,284	37,028
13	Bojong		17,877	17,336	35,213
14	Saketi		23,060	22,528	45,588
15	Cisata		12,409	12,135	24,544
16	Pagelaran		18,252	17,393	35,645
17	Patia		14,388	14,112	28,500
18	Sukaesmi		18,024	17,127	35,151
19	Labuan		29,572	27,491	57,063
20	Carita		17,227	16,428	33,655
21	Jiput		15,072	14,595	29,667
22	Cikedal		16,147	15,947	32,094
23	Menes		18,676	18,310	36,986
24	Pulosari		14,790	14,239	29,029
25	Mandalawangi		24,912	24,345	49,257
26	Cimanuk		20,661	19,770	40,431
27	Cipeucang		15,199	14,302	29,501
28	Banjar		15,821	15,561	31,382
29	Kaduhejo		18,279	17,936	36,215
30	Mekarjaya		9,854	9,896	19,750
31	Pandeglang		22,532	20,889	43,421
32	Majasari		25,426	23,948	49,374
33	Cadasari		17,363	15,569	32,932
34	Karangtanjung		17,894	16,643	34,537
35	Koroncong		9,711	9,134	18,845
Jumlah			<b>618,304</b>	<b>593,605</b>	<b>1,211,909</b>

Sumber : *Data BPS PDA 2020*

## **WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN**

Kabupaten Pandeglang secara administratif sampai akhir tahun 2020 secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 kelurahan dan 326 desa.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

### **A. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari :**

- PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKWp dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
- PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
- PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

### **B. Rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari :**

- ✓ Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa.
- ✓ Pengembangan kawasan agropolitan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan
- ✓ Pengembangan kawasan minapolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi:

### KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kebijaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya ini menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat, termasuk tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan bidang sosial tidak harus dapat dilihat dari segi fisik yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana sedangkan segi mental meliputi kondisi mental penduduknya.

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2020 sebanyak 1.211.911 orang terdapat 812.368 orang atau 67,96% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 491.031 orang atau sekitar 60,44 % merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

**Tabel 1.3**

Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang,  
Tahun 2018 – 2020

NO.	KARAKTERISTIK	TAHUN	
		2019	2020
1	2	3	4
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	831.548	836.878
2	Angkatan Kerja (AK)	522.323	514.100
	a. Bekerja	478.814	469.332
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	43.509	44.768
3	Bukan Angkatan Kerja	309.225	322.778
	a. Sekolah dan Mengurus RT	262.261	274.187
	b. Mengurus RT	46.964	39.585
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	62.81	61,44
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8.33	8,71
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	91.67	91,29

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang



Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2020, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 61,44%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan dari 62,81% pada tahun 2019. Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 81,21% sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 40,97%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumah tangganya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 91,29 persen, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 91,67 persen.

**Tabel 1.4**

Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2020

Lapangan Usaha	(%)
1. Pertanian	33,70
2. Industri Pengolahan	9,70
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,74
4. Jasa Kemasyarakatan	14,54
5. Lainnya*)	19,32
<b>Jumlah (jiwa)</b>	

**Sumber :** BSPS Kab. Pandeglang Tahun 2019

\*) Lainnya : sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan

## PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing masyarakat/penduduk dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, pemerintah akan lebih mudah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik.

Tolak ukur yang sangat mendasar di bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) penduduk dewasa. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis. Dalam tulisan ini yang dimaksud buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya.

Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 15 tahun ke atas di Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2020 mencapai 97,13 persen, sisanya sebanyak 2,87 persen adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun ke atas.

**Tabel 1.5**

Angka Melek Huruf (Latin) Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas  
Menurut Jenis Kelamin  
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	97,56	97,87	98,22
Perempuan	93,22	95,48	96,00
Laki-laki + Perempuan	95,43	96,65	97,13

Sumber : Susenas Tahun 2018 - 2020

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, maka penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah mampu membaca dan menulis, seperti terlihat pada **tabel 1.5** yaitu pada tahun 2020 untuk penduduk laki-laki sebesar 98,22 persen, sedangkan untuk perempuan sebesar 96,00 persen. Secara umum, kemampuan baca tulis masyarakat Pandeglang tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 baik secara total maupun jenis kelamin.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Pandeglang mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Pandeglang tahun 2020 baru mencapai 6,96 tahun, ini berarti rata-rata pendidikan penduduk Pandeglang baru sampai jenjang SLTP kelas satu. Jadi secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pandeglang baru lulus SD dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP.

Dalam rangka meningkatkan program wajar dikdas 9 tahun kiranya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya bagi Dinas/Instansi terkait. Program ini dikatakan berhasil apabila Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-15 tahun mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh anak usia SD dan SLTP dalam keadaan bersekolah. Melihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kiranya dibutuhkan program-program untuk mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan setingkat SLTP. setingkat SLTP. Selain itu perlu juga menyadarkan masyarakat agar termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

**Tabel 1.6**

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk  
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2018-2020

Tahun	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)
2018	6,63
2019	6,72
2020	6,96

Sumber : Susenas Tahun 2015 – 2017 dan Disdikbud



Selain indikator Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah, gambaran kualitas SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun keatas di Pandeglang tahun 2020 paling banyak adalah masih tingkat SD sederajat yaitu sebesar 42,33 persen, sedangkan SLTP hanya 22,83 persen. Yang sangat mengkhawatirkan adalah pada tahun 2019 masih ada penduduk yang tidak/belum tamat SD sederajat yaitu mencapai 16,11 persen, dimana pada kelompok ini masih terindikasi adanya penduduk diluar usia wajar dikdas (usia dewasa/tua).

**Tabel 1.7**

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Tingkat Jenjang	Laki- laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	12,20	20,15	16,11
SD/MI/Sederajat	41,94	42,74	42,33
SLTP/Sederajat	24,04	21,58	22,83
SLTA/SMK/Sederajat	17,78	11,31	14,60
Universitas	4,04	4,21	4,12
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

Sumber : Disdikbud Tahun 2020

Bila melihat komposisi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan gender, penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan yang belum atau tidak menamatkan SD sederajat. Di jenjang Pendidikan SD sederajat perempuan lebih mengungguli dari laki-laki. Di jenjang Pendidikan SLTP sederajat dan tingkat Pendidikan SLTA sederajat laki-laki mengungguli dari perempuan. Untuk Jenjang Pendidikan Universitas perempuan kembali mengungguli laki laki hal ini terlihat dalam tabel 4.3 lulusan Universitas perempuan lebih mengungguli dibandingkan laki-laki sebanyak 4.21 persen.

### TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

Partisipasi sekolah anak di Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia

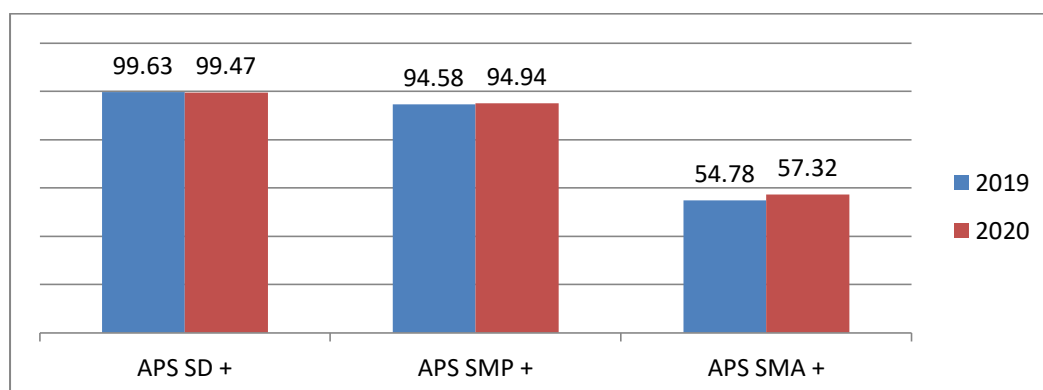
SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

APS Kabupaten Pandeglang untuk anak usia SD sebesar 99,63 persen. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun yang bersekolah mencapai 99,63 persen, sisanya sebesar 0,37 persen dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang belum pernah sekolah. Partisipasi sekolah anak usia SD perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan partisipasi anak usia SD laki-laki yaitu masing-masing 99,00 persen dan perempuan 100 persen.

Bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak usia SLTP dan SLTA jauh lebih rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat Pandeglang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS SLTP tahun 2019 sebesar 94,94 persen dan APS SLTA sebesar 57,32 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTP (usia 13-15), yang bersekolah hanya 95 anak, atau dari 100 anak usia SLTP ada sekitar 5 anak yang tidak bersekolah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk anak usia SLTA menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) hanya 57 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

**Tabel 1.8**

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2019-2020



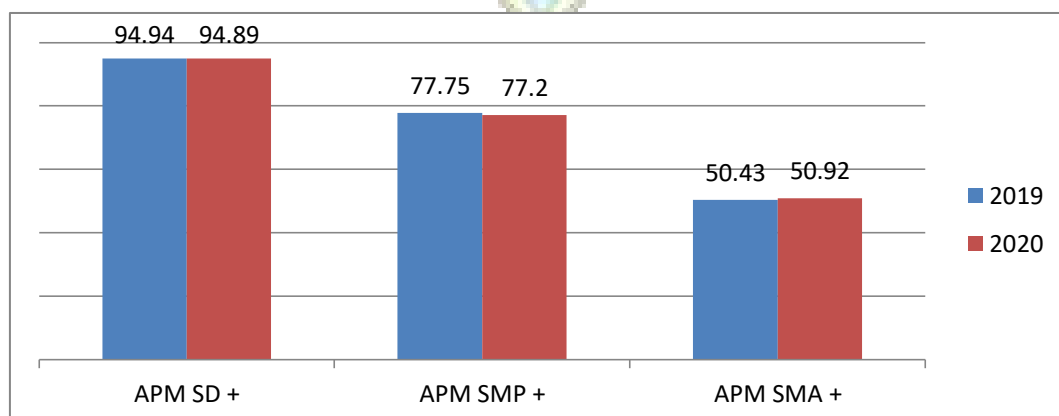
Sumber : Susenas Tahun 2019 - 2020

Bila dibandingkan berdasarkan gender, partisipasi sekolah anak usia SLTP (13-15 tahun) perempuan lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan untuk anak usia SLTA (16-18 tahun) partisipasi sekolah anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.

Selain APS, biasanya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap sekolah digunakan juga Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang dimaksud. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar merupakan Persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Pada gambar 1.9 terlihat bahwa pada tahun 2020, Partisipasi Murni (APM) anak usia SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 94,94, APM SLTP/Sederajat tercatat sebesar 77,75 sedangkan APM SLTA/Sederajat tercatat sebesar 50,43. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SD/MI/Sederajat, ada 95 anak yang bersekolah dan anak yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan SD/MI/. Begitu juga halnya dengan partisipasi murni anak usia SLTP dan SLTA.

**Tabel 1.9**  
Angka Partisipasi Murni  
Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2019-2020

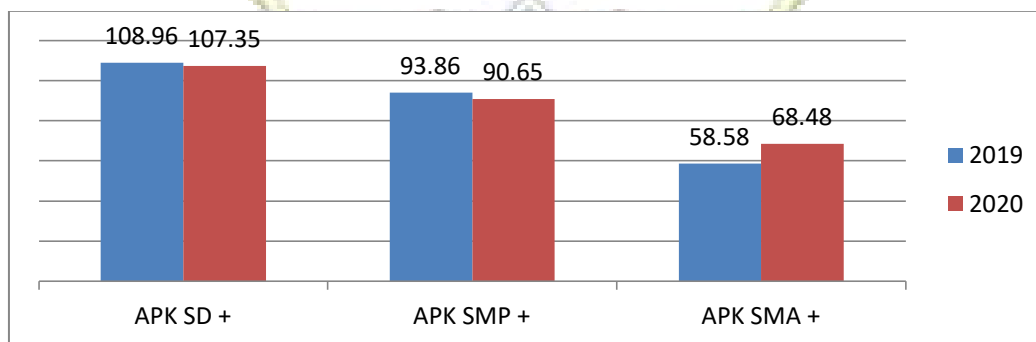


Sumber : Susenas Tahun 2019 - 2020



Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 108,96. Hal ini menunjukkan program wajar dikdas 6 tahun sudah tercapai di kabupaten Pandeglang. Angka ini juga menunjukkan bahwa murid SD/MI/Sederajat yang bersekolah di Pandeglang cukup banyak yang usianya tidak tepat 7- 12 tahun. Ini terjadi karena adanya anak yang terlambat sekolah sehingga usia di atas 12 tahun masih duduk di bangku SD/MI/Sederajat. Selain itu, anak yang terlalu cepat disekolahkan oleh orangtuanya sehingga usia 5 atau 6 tahun sudah disekolahkan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK SLTP dan SLTA pada tahun 2019 tercatat masing-masing sebesar 93,86 dan 58,58.

**Tabel 1.10**  
Angka Partisipasi Kotor Menurut Jenjang Pendidikan  
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2019-2020



Sumber : Susenas Tahun 2019-2020

Bila dibandingkan ketiga indikator partisipasi sekolah baik APS, APM maupun APK pada jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA dapat terlihat perbandingan antara anak yang bersekolah tepat pada usia sekolahnya. Untuk anak usia SD, APK lebih besar dibandingkan APS, ini menunjukkan bahwa anak yang usianya bukan usia SD tapi bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan anak usia SD yang bersekolah bukan di SD. Sedangkan anak usia SLTP dan SLTA juga sama.

### **FASILITAS PENDIDIKAN**

Apabila berbicara tentang program pendidikan, hal yang paling penting adalah fasilitas pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan khususnya sarana berupa gedung merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu wilayah.

Jumlah Sarana Sekolah, Guru dan Siswa tahun ajaran 2019/2020 dapat dilihat pada **tabel 1.11** Tahun ajaran 2019/2020 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 149,65 siswa dengan jumlah murid per guru rata-rata 16,16 orang dan sekolah Tingkat SLTP rata-rata menampung 201,97 siswa dengan jumlah murid rata-rata 12,49 orang per guru. Sedangkan untuk sekolah tingkat SLTA rata-rata menampung 250,62 siswa dengan rata-rata banyaknya murid per guru 14,13 orang.

**Tabel 1.11**

Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah Kabupaten Pandeglang, Tahun 2020

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Sederajat	1.032	9.554	154.442	16,16	149,65
SLTP Sederajat	361	5.838	72.913	12,48	201,97
SLTA Sederajat	224	3.971	56.140	14,13	250,62

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kab. Pandeglang 2020

Dengan melihat rasio murid guru, keadaan ini dinilai sudah cukup baik bahkan jumlah guru untuk mengawasi murid cenderung berlebih.

Pada tahun ajaran 2019/2020 satu orang guru SD/ MI mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 12 sampai 13 orang siswa. Sedangkan satu orang guru SLTA mengajar atau mengawasi 14 sampai 15 orang siswa.

Bila dikaitkan dengan indikator pendidikan lainnya, terlihat ada hal yang cukup kontradiktif. Jumlah sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar cukup banyak, namun partisipasi masyarakat terhadap sekolah tingkat SLTP dan SLTA masih cenderung rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa program dari pemerintah sudah siap untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, namun respon masyarakat masih

perlu ditingkatkan lagi sehingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTP dan SLTA, sedangkan untuk tingkat SD sudah cukup baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari kondisi di atas adalah apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tingkat sebarannya sudah merata atau justru terkonsentrasi pada segmen-segmen tertentu, sehingga sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu aksesnya masih sulit.

### **KESEHATAN**

Pembangunan di bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan agar APBN/APBD lebih diprioritaskan ke sektor kesehatan selain pendidikan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH). Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan kesehatan.

Indikator Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup merupakan indikator utama yang menunjukkan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2018 Jumlah Kematian Bayi 0-12 bulan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 186 menjadi 178 di tahun 2020. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 relatif meningkat dari 64,24 tahun (tahun 2019) menjadi 64,49 tahun (tahun 2020).

Angka ini memberi makna bahwa setiap bayi di kabupaten Pandeglang yang lahir pada tahun 2020 mempunyai harapan untuk hidup selama 64,04 tahun.

**Tabel 1.12**

Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk  
Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2017

Indikator Derajat kesehatan	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi *)	214	186	178
Angka Harapan Hidup (tahun) **)	64,04	64,24	64,49

**Sumber :** \*) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

\*\*) Penghitungan Metode Baru Susenas Tahun 2018-2020

Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator Angka Kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari table 1.13 pada tahun 2020 sebanyak 15,13 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, Angka Kesakitan cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 15,13 persen. Bila dibedakan berdasarkan gender, angka kesakitan penduduk laki-laki yaitu 14,75 persen lebih kecil dari pada penduduk perempuan yang sebesar 15,53 persen.

**Tabel 1.13**

Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk  
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Indikator Kesehatan	2020		
	L	P	Total
Angka Kesakitan (%)	14,75	15,53	15,13
Rata-Rata Lamanya Sakit (hari)	4,25	3,26	3,60

**Sumber:** Susenas Tahun 2020

Rata-rata jumlah hari sakit atau terganggu aktivitas sehari-harinya pada tahun 2019 sebesar 3,60 hari. Rata-rata lamanya sakit penduduk laki-laki relatif lebih lama dibandingkan penduduk perempuan. Ratarata lamanya sakit penduduk perempuan 3,26 hari dan penduduk laki-laki 4,25 hari.



## **PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN**

Dalam era keterbukaan aparat pemerintah haruslah profesional dalam kinerjanya, terutama dalam mengantisipasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sehingga diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak terdapat lagi di Kabupaten Pandeglang. Sikap aparat juga dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani. Dengan demikian upaya perubahan dan pembahasan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral.

Jumlah aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang sampai akhir tahun 2020 sebanyak **9.772** ASN yang tersebar bekerja pada 68 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, 11 OPD berupa Lembaga Teknis Daerah, 15 OPD berupa Dinas Daerah dan 35 OPD berupa Kecamatan serta 13 Kelurahan.

**Tabel 1.14**

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang  
berdasar Golongan Ruang Tahun 2020

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
I	65	16	81
II	772	493	1.265
III	2.442	2.994	5.436
IV	1.420	1.570	2.990
Jumlah	4.699	5.073	9.772

**Sumber :** Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

**Tabel 1.15**

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang  
berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

SD	SLTP	SLTA/D I	D2	D3	S1/DIV	S2/SIII
44	116	1.169	877	702	6.424	440

**Sumber :** Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

## **LINGKUNGAN**

Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki luas sebesar 274.689 ha, yang terdiri dari hutan negara 56.501 ha, hutan rakyat 3.682,57 ha, lahan sawah 54.739 ha dan lainnya 136.409 ha. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan wilayah hutan dilakukan dengan pola pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Demikian juga dengan pengelolaan lahan sawah yang harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.

### **1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **1.4.1. Struktur organisasi**

Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Pandeglang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, terdiri dari
  - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
  - 3) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial;
  - 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;

- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A , menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A , menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe B , menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B , menyelenggarakan urusan Perindustrian, perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 11) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata;
- 12) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B, menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 14) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B , menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
- 15) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 16) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B , menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan;
- 17) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
- 18) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A , menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan;
- 19) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan;
- 20) Dinas Perikanan Tipe B , menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan;

- 21) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - 22) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah terdiri atas:
- 1) Badan Kepegawaian dan Diklat Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
  - 4) Badan Pelayanan Pajak Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal pajak daerah.
6. 35 Kecamatan ; dan
7. 13 Kelurahan dan 326 Desa.

#### **1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pandeglang tercermin pada tugas-tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas Bupati, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, organisasi, dan tatalaksana, dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, serta berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya, pembinaan generasi muda dan olah raga serta pembuatan LKIP tahunan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah diberikan fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten, menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah,



- pembinaan generasi muda dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan data LKIP.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, dan menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas. Fungsi Sekretariat DPRD adalah: memfasilitasi rapat anggota DPRD, melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, dan mengelola tata usaha DPRD.
  - c. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
  - d. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - e. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Camat melaksanakan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Untuk dapat melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagai berikut: memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas yang berada di wilayah kerjanya, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa.
  - f. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: mendorong partisipasi masyarakat dan mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

## 1.5 SISTEMATIKA LKjIP TAHUN 2020

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>: Pendahuluan</b>	Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Tahun 2020
<b>BAB II</b>	<b>: Perencanaan Kinerja</b>	Menjelaskan muatan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2020
<b>BAB III</b>	<b>: Akuntabilitas Kinerja</b>	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2020. Selain itu juga disajikan pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2020.
<b>BAB IV</b>	<b>: Penutup</b>	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

**Lampiran**, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pandeglang Tahun 2020;
2. Realisasi Anggaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2020;
3. Penghargaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 sampai Tahun 2020.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahun yang memuat 1 (*satu*) Visi, 6 (*enam*) Misi, 8 (*delapan*) Sasaran, 30 (*tiga puluh*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang harus dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang yang disajikan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 ini berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan.

#### A. VISI

Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah: **"Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, maritimbisnis dan wisatabisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 2020"**

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### (1) Terwujudnya Pandeglang Berkah :

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan *motto* yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

**(2) Transformasi Harmoni :**

Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian.

**(3) Menuju Rumah Sehat :**

Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara baik.

**(4) Menuju Keluarga Sejahtera :**

Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurang jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang maju dan mandiri.

**B. M I S I**

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- (2) Membangun konektivitas wilayah;
- (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim;
- (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata;
- (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah.

Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan peduli sesama;
- (2) Membangun konektivitas wilayah, dengan menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian yang berwawasan lingkungan;



- (3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan produksi bahan mentah pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam kerangka agrobisnis;
- (4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan memperbaiki pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui pendekatan industri dan bisnis;
- (5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata, dengan meningkatkan kualitas destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata;
- (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi yang bersih dan melayani berbasis sistem data dan informasi, serta meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### C. TUJUAN

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas, Bahagia, dan Peduli Sesama;
- 2) Menjadikan pergerakan masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian;
- 3) Mengoptimalkan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
- 5) Meningkatkan nilai tambah maritimbisnis;
- 6) Meningkatkan wisatabisnis;
- 7) Memperkuat Sistem Inovasi Daerah;
- 8) Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

#### D. SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat*, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat;
  - b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat;
  - c. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Meningkatnya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar;
  - e. Meningkatnya implementasi norma agama;
  - f. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;
  - g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. Terkendalnya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;
  - i. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
  - j. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.
2. Misi : *Membangun Konektivitas Wilayah*, dengan sasaran :
  - a. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah;
  - b. Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar;
  - c. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan;
  - d. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

3. Misi : *Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian*, dengan sasaran :
  - a. Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian;
  - b. Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian;
  - c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Misi : *Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim*, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis.
5. Misi : *Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata*, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata;
  - b. Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata;
  - c. Meningkatnya manajemen pengelolaan objek wisata.
6. Misi : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah*, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi;
  - b. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata;
  - c. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani;
  - d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
  - e. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
  - f. Terciptanya masyarakat yang demokratis;
  - g. Terciptanya supremasi hukum;
  - h. Berkurangnya resiko bencana.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020

Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusunlah sasaran strategis dengan indikator-indikator tertentu. Setiap tahunnya, target dari indikator sasaran strategis ini ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Sehubungan dalam rangka pendampingan yang sedang dilaksanakan bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditemukan adanya ketidaksinkronan di Visi dan Misi, dari itu laporan yang kami sajikan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2020.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mengacu pada sasaran strategis dan target Indikator Sasaran Strategis untuk tahun 2020 dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati  
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	100,00	%
		c. SMU Sederajat		
		Angka Partisipasi Murni		
		a. SD Sederajat	94,79	%
		b. SMP Sederajat	74,96	%
		c. SMU Sederajat		
		Angka Partisipasi Kasar		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	83,84	%
		c. SMU Sederajat		
		Angka Melek Huruf	100,00	%
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	Tahun
		Indeks Pendidikan	65,62	Indeks
		PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,434,766	Rp. Juta





		PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	777.622	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor	5,12	%
	<b>Sasaran ini didukung oleh program:</b>			
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal		4,822,064,825.00	DISDIKBUD	
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun		35,769,551,155.00	DISDIKBUD	
Program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan		427,323,400.00	DISDIKBUD	
Program peningkatan layanan pendidikan		77,656,300.00	DISDIKBUD	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGE T	SATUA N
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Angka Harapan Hidup	65.39	Tahun
		Angka Kesakitan	20.51	%
		Rata-rata lama sakit	4,15	Hari
		Persentasi Balita Gizi Buruk	0.66	%
		Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	68,34	Indeks
		PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	384.895	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222,725	%
		Indek Angka Harapan Hidup/ Indek Kesehatan	65,39	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	117,090,149,462.00	DINKES	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3,690,396,090.00	DINKES	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	4,339,506,750.00	DINKES	
	Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	26,722,980,370.00	DINKES	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	189,401,250.00	DINKES	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	67,595,313,999.00	DINKES	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
3.	Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong- kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	99.619	Jiwa
		Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	7,45	%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8,06	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
		Indeks Gini Rasio	0,18	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program penanggulangan kemiskinan		296,845,000.00	DINSOS	
Program sarana dan prasarana sosial		496,347,170.00	DINSOS	
Program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi pmks		394,048,000.00	DINSOS	
program pemberdayaan masyarakat		258,180,000.00	DINSOS	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
4.	Meningkatkannya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	8,30	%
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91.100	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2. 657.850	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	48.629	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor JasaPerusahaan	0,85	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Berbasis Agro	18,250,000.00	DISPERINDAG	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18,250,000.00	DISPERINDAG	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,000,158,000.00	DISPERINDAG	
	Program Pembangunan/ Pengembangan Sentra-sentra	1,000,158,000.00	DISPERINDAG	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
5.	Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	100	Lembaga / Organisasi
		Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	-	Kali
		Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	91	Kali
		Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	98,44	%
		Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,90	Tahun
		Indeks Pendidikan	65,62	Indeks
		Sasaran ini didukung oleh program:		
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Peningkatan Kualitas, Peran Dan Fungsi Ulama Dan Santri	140,000,000.00	SETDA	
	Program Fasilitas, Koordinasi Dan Pembinaan Kegiatan Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial	31,725,000.00	SETDA	
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	377,178,000.00	SETDA	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Keagamaan	128,551,000.00	SETDA	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
6.	Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	3	Cabang
		Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	2	Unit
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	5	Penghargaan
		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	20	Fasilitasi / Kegiatan
		Jumlah Fasilitasi Olahraga	11	Unit
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program peningkatan peran serta pemuda		891,239,000.00	DISPORA	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		255,850,000.00	DISPORA	
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda		200.000.000,00	DISPORA	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		2,045,000,000.00	DISPORA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda dan Olah Raga		3,259,880,000.00	DISPORA	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100,00	%
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	90,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		190,773,750.00	DP2KBP3A	
Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		100,905,000.00	DP2KBP3A	
Program Pengarusutamaan Gender		11,123,015,434.00	DP2KBP3A	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
8. <b>Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi</b>	Jumlah Penduduk	1.336.515	Jiwa
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	%
	Jumlah Rumah Tangga	388.515	KK
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	100,00	%
	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	100,00	%
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	100,00	%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	100,00	%
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100,00	%
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100,00	%
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	100,00	%
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	100,00	%
	Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	100,00	%
<b>Sasaran ini didukung oleh program:</b>			
<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>	
Program Keluarga Berencana	11,123,015,434.00	DP2KBP3A	
Program Pemberdayaan Keluarga	100.875.000,00	DP2KBP3A	
Program Ketahanan Keluarga	190,773,750.00	DP2KBP3A	



Program Advokasi Dan Kie Keluarga Sejahtera	156.065.000,00	DP2KBP3A
Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR	58,502,500.00	DP2KBP3A





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan AntaraUMKM Tingkat Kabupaten dengan pengusaha Tingkat Provinsi/Nasion	1	1 kali / tahun
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.787.882	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.875	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.657.850	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Indeks Tingkat Daya Beli/Pengeluaran	63,59	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pemberdayaan Ekonomi		247,192,000.00	DISKOP&UMKM	
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		79,070,000.00	DISKOP&UMKM	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		30,000,000.00	DISKOP&UMKM	
Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM		406,958,000.00	DISKOP&UMKM	





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
10.	<b>Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat</b>	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	100,00	%
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	90,00	%
		Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	100,00	%
		<b>Sasaran ini didukung oleh program:</b>		
	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>	
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	6,000,000.00	DISNAKERTRAN	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	68,880,000.00	DISNAKERTRAN	
	Program Fasilitasi Transmigrasi	6,000,000.00	DISNAKERTRAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
11.	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2.685.511	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1.422.555	Rp. Juta
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96,00	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
		Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	90,00	%
		Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Rasio Elektrifikasi	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	3.561.478	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	631.270	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan		3,753,612,950.00	DISHUB	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	365,00	Hari
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	12,00	Kegiatan
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	12,00	Kegiatan
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	70,63	%
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	100.067	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	0,32	%

Sasaran ini didukung oleh program:

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
--------------	----------------	------------



Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	6,760,179,287.00	DISPERKIM
--	------------------	-----------





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
13.	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan		
		a. Baik	49,28	%
		b. Sedang	26,11	%
		c. Buruk	11,46	%
		d. Rusak Berat	13,15	%
		PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2,685,511	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,422,555	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi SektorTransportasi dan Pergudangan	1,58	%
		Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik danSedang	75,38	%
		Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Bangunan	2,140,674	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Bangunan	1,258,501	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		5,516,542,167.00		DINAS PUPRR





Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6,760,179,287.00	DINAS PUPRR
Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Ke-PU-an	112,024,000.00	DINAS PUPRR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	6,781,037,750.00	DINAS PUPRR





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
14.	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air	92,98	%
		Minum yang Aman	68,17	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	23,22	%
		Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	79,07	%
		Persentase Pengangkutan Sampah	79,07	%
		Persentase pengoperasian TPA	70	%
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	57,29	%
		Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	68,17	%
		Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	%
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	100,00	%
		Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	90,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.436	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	



Program Perencanaan Tata Ruang	79,850,000.00	DINAS PUPR
Program Ampal ( Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan)	18,394,375,008.00	DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN
Program Pengelolaan Dan Pemeliharaan Taman Kota Serta Ruang Terbuka Hijau (Rth)	93,645,200.00	DINAS PERKIM DAN PERTANAHAN



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
15.	Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715. 702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4,909,558,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Berkelanjutan	779,328,500.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Perlindungan Tanaman Hewan dan Masyarakat Veteriner	2,750,000.00	DINAS PERTANIAN	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
16.	<b>Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian</b>	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.787.882	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.875	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
		<b>Sasaran ini didukung oleh program:</b>		
	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANIAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
17.	Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715. 702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%
		Penguatan cadangan pangan	93,11	%
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100,00	%
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100,00	%
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00	%
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	%
		Penanganan daerah rawan pangan	93,11	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan		249,404,000.00		DINAS KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
18.	Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.316.970	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.857.087	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor IndustriPengolahan	0,73	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Pemanfaatan Pemasaran Dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		86,040,000.00	DINAS PERIKANAN	
Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap		1,484,473,000.00	DINAS PERIKANAN	
Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya		109,615,000.00	DINAS PERIKANAN	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
19.	Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN TANGKAP		1,484,473,000.00	DINAS PERIKANAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA		109,615,000.00	DINAS PERIKANAN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
20.	Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	6.504.095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.467	Rp. Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya		4,822,064,825.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Penciptaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata		496,228,000.00	DINAS PARIWISATA	
Program Sarana Dan Prasarana Wisata		84,115,000.00	DINAS PARIWISATA	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
21.	Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp.Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.487	Rp.Juta
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Informasi Dan Promosi Pariwisata		161,707,500.00	DINAS PARIWISATA	







SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
22.	Meningkatnya ManajemenPengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462.681	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227.467	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor JasaLainnya	2,84	%
		Cakupan kajian seni 50%	100,00	
		Cakupan fasilitasi seni 30%	100,00	
		Cakupan gelar seni 75%	100,00	
		Misi kesenian 100%	100,00	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100,00	
		Cakupan tempat 100%	100,00	
		Cakupan organisasi 34%	100,00	
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penciptaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata		496,228,000.00	DINAS PARIWISATA	
Program Sarana Dan Prasarana Wisata		84,115,000.00	DINAS PARIWISATA	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
23.	Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan investasi industri pertanian	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,434,786	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	777,622	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	5,12	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANIAN	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANIAN	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
24.	Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5.715.702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.939.524	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.330.739	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	0,73	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Sdm Dan Penyuluhan	504,280,000.00	DINAS PERTANI AN	
	Program Perluasan Jaringan Bisnis Dan Pasar Produk Pertanian	60,985,000.00	DINAS PERTANI AN	
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri/ Usaha Potensial	1,000,158,000.00	DINAS PERTANI AN	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
25	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	Level
		Kapabilitas APIP	Level 3 D Ct	Level
		Opini LKPD	WTP	Tingkat
		Nilai SAKIP	BB	Nilai
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publik	82,00	%
		Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	90,53	%
		PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.006.082	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	15,89	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan



Sasaran ini didukung oleh program:			
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	47,465,884,294.00	SETWAN
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	2,685,033,398.00	DISKOMSANTIK
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	817,919,900.00	SETDA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	354,513,475.00	BKD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	656,249,000.00	SETDA



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKPD	WTP	Tingkat
		Peningkatan Pendapatan Daerah	229.068.19 2.270,00	Rp. Milyar
		Persentase kenaikan PAD	125,00	%
		Alokasi anggaran untuk pembangunan	899.000.00 0.000	Rp. Milyar
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah		561,494,200.00	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	
Program Pengelolaan Penganggaran Daerah		1,180,466,600.00	BPKAD	
Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah		956,580,457.00	BPKAD	
Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah		490,652,000.00	BPKAD	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1,195,540,302.00	BPKAD	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
27	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91.100	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	849.128	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	0,85	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	%
		PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.667.582	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Kemampuan Investasi	650,02	Rp. Miliar
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal		55,475,000.00	DPMPTSP	
Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi		49,900,000.00	DPMPTSP	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		41,122,500.00	DPMPTSP	
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah		77,220,000.00	DPMPTSP	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik	82,00	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	94,00	%
		Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	-	Kali
		Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	68,96	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	112,832,900.00	DPMPD	
	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik	1,446,355,000.00	KESBANGPOL	
	Program Fasilitasi Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat	193,897,900.00	DNAS KETAHANAN PANGAN	
	Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan	131,250,000.00	BADAN KESBANGPOL	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	Level
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten/Kota	98,45	%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	95,64	%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100,00	%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00	Patroli/hari/orang
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	150,725,000.00	SATPOL PP	
	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	241,630,000.00	SATPOL PP	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	98,45	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layananWilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95,64	%
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	99,75	%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter padaWMK	100,00	%
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	93,11	%
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	97,91	%
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	97,91	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pra, Saat (Tanggap Darurat) dan Pasca Bencana)		53,029,843,044.00	BPBD	

Untuk penjelasan lebih lanjut kami sampaikan dalam dokumen capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk fasilitasi atas pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Pada bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencakup capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021. Capaian Indikator sasaran strategis merupakan capaian indikator makro, indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator sasaran strategis yang merupakan pencapaian dari rata-rata pelaksanaan outcome/output dari program/kegiatan yang terhimpun berdasarkan sasaran strategis yang ada di RPJMD. Indikator Kinerja Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja yang dihasilkan/ distimulasi dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Gambaran organisasi publik yang sehat tercermin dari tingkat capaian kinerja yang optimal yang diukur dari indikator kinerja yang terukur sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Tahun 2018 ini merupakan momentum yang penting bagi Kabupaten Pandeglang untuk tetap berkomitmen menunjukkan kesungguhan kinerjanya bagi terselenggaranya pemerintahan yang melayani bagi seluruh elemen masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Pandeglang pada umumnya secara holistik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang sudah tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1	>85 -100	AA	Memuaskan
2	>75-85	A	Sangat Baik
3	>65-75	B	Baik
4	>50-65	CC	Cukup Baik (Memadai)
5	>30-50	C	Agak Kurang
6	0-30	D	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



3.1.1.1 Perjanjian Kinerja Ke satu : *Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah				97,10		97,125	97,125
	a. SD Sederajat	%	100,00	99,63	99,63	100	99,65	99,65
	b. SMP Sederajat	%	100,00	94,58	94,58	100	94,60	94,60
	Angka Partisipasi Murni				100,25		100,03	100,03
	a. SD Sederajat	%	98,33	94,94	93,35	94,79	94,83	100,04
	b. SMP Sederajat	%	72,56	77,75	107,15	74,96	74,98	100,02
	Angka Partisipasi Kasar				101,41		101,42	101,41
	a. SD Sederajat	%	100	108,96	108,96	100	108,98	108,98
	b. SMP Sederajat	%	81,40	93,86	115,30	83,84	93,86	111,95
	Angka Melek Huruf	%	100	96,65	96,65	100	96,69	96,69
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	6,72	88,18	7,90	7,1	89,87
	Indeks Pendidikan	Indeks	64,28	59,68	92,84	65,62	59,72	91,02
	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	1,236,172	977,640	79,08	1,434,766	1.300.000	90,60
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	718,322	649.400	90,40	777,622	750.000	96,44

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 8 (*Delapan*) indikator sasaran strategis dengan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 95,40 %

3.1.1.2 Perjanjian Kinerja Ke dua : *Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
2. <b>Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat</b>	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,01	64,24	<b>98,81</b>	65,39	64,49	<b>98,62</b>
	Angka Kesakitan	%	22,97	17,42	<b>75,83</b>	20,51	15,13	<b>73,76</b>
	Rata-rata lama sakit	Hari	4,61	4,34	<b>94,14</b>	4,15	3,60	<b>86,74</b>
	Persentasi Balita Gizi Buruk	%	0,76	1,15	<b>151,31</b>	0,66	0,88	<b>133,33</b>
	Indeks Angka Harapan Hidup / Indeks Kesehatan	Indeks	68,06	64,24	<b>94,38</b>	68,34	67,75	<b>99,136</b>
	PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	Rp. Juta	335,488	192.520	<b>57,38</b>	384,895	284.020	<b>73,79</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **6 (enam)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **94,23%**

3.1.1.3 Perjanjian Kinerja Ke tiga : *Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan pada Kantong-Kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
3. Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong-kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	102,668	116.115	88,41	99,619	114,090	87,31
	Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	%	7,77	9,61	80,85	7,45	9,42	79,08
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,32	8,33	99,87	8,06	8,71	92,53
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,59	65,57	96,98	63,59	65,95	103,71
	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,18	0,20	111,11	0,18	0,379	47,49

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 82,1 %

3.1.1.4 Perjanjian Kinerja Ke empat : *Meningkatnya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
4. Meningkatkan Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	%	8,25	0,70	8,48	8,30	0,70	8,43
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	3,463,758	837.938,93	24,19	3,853,035	837.938	24,19
	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	79,974	16.558,54	20,70	91,100	16,558	18,5
	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,516,735	2.399.850	94,95	2,657,850	2.573.390	94,95
	PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	46,268	44,220	95,57	48,629	46,69	95,57

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 48,76%

3.1.1.5 Perjanjian Kinerja Ke lima : *Meningkatnya Implementasi Norma Agama*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
5. <b>Meningkatnya Implementasi Norma Agama</b>	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	Lembaga / Organisasi	100	33	33	100	68	68
	Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	Kali	-	0	100	0	0	100
	Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	Kali	91	2	2,2	91	4	4,39
	Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	%	100	99,63	99,63	100	99,47	99,47
	Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	%	98,33	94,94	96,55	98,44	94,89	96,55
	Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	%	100	108,96	108,96	100	107,35	107,35
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	6,72	88,18	7,90	6,96	83,54
	Indeks Pendidikan	Indeks	64,28	59,68	92,84	65,62	59,72	91,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **8 (delapan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **81,28%**

3.1.1.6 Perjanjian Kinerja Ke enam : *Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
6. <b>Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga</b>	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	Cabang	3	3	100	3	10	333,33
	Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Unit	2	1	50	2	1	50
	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	Penghargaan	5	31	620	5	10	200
	Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	Fasilitas / Kegiatan	20	1	5	20	4	20
	Jumlah Fasilitas Olahraga	Unit	11	2	18	11	17	154,54

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **5 (lima)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **151,5 %**



3.1.1.7 Perjanjian Kinerja Ke tujuh : *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
7. <b>Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	%	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	70	70	90	75	83,33
	Cakupan Perempuan & Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	88	70	70	100	75	75

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 89,58 %

3.1.1.8 Perjanjian Kinerja Ke delapan : *Terkendalinya Angka Kelahiran dengan meningkatkan Kualitas Reproduksi*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
8. <b>Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi</b>	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,321,281	1.209.011	<b>109,28</b>	1,336,476	1.211.909	<b>91,71</b>
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,17	0,58	<b>201,72</b>	1,15	0,56	<b>205,35</b>
	Jumlah Rumah Tangga	KK	382.321	299,576	<b>78,35</b>	388.515	353.185	<b>90,90</b>
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	%	100	5,32	<b>65,78</b>	100	5,35	<b>65,42</b>
	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	%	100	72,35	<b>89,84</b>	100	73,60	<b>73,60</b>
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	%	100	34,46	<b>34,46</b>	100	14,65	<b>14,65</b>
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	%	100	90,15	<b>128,78</b>	100	80,98	<b>80,98</b>



	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	100	86,83	<b>99,80</b>	100	76,08	<b>76,08</b>
	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	%	100	25	<b>25</b>	100	20,64	<b>20,64</b>
	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	%	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi KebutuhanMasyarakat 30% Setiap Tahun	%	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>
	Data Mikro Keluraga di setiap Desa/Kelurahan 100% di SetiapTahun	%	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **12 (duabelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **84.94%**

3.1.1.9 Perjanjian Kinerja Ke sembilan : *Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
9. <b>Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1 kali / tahun	1	1	100	1	1	100
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,648,452	1.518.810	92,13	1.787.882	1.660.920	92,90
	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	3,463,758	2.982.060	86,09	3.853.035	3.311.650	85,94
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,229,414	1.208.450	98,29	1,278,875	1.293.390	101,13



	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	2,526,735	2.399.850	<b>94,79</b>	2,657,850	2.573.390	<b>96,82</b>
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,71	<b>97,26</b>	0,73	0,72	<b>98,63</b>
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,91	1,41	<b>36,06</b>	3,91	1,42	<b>36,57</b>
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,32	65,57	<b>103,55</b>	63,59	65,95	<b>103,37</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **8 (delapan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **89,42 %**

3.1.1.10 Perjanjian Kinerja Ke sepuluh : *Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
10. <b>Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat</b>	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	95,00	20	<b>20,8</b>	100	128	<b>128</b>
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100,00	75	<b>75</b>	100	0	<b>0</b>
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100,00	142	<b>142</b>	100	0	<b>0</b>
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	70,00	50	<b>71,42</b>	90	9,13	<b>10,14</b>
	Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	100,00	30	<b>30</b>	100	35	<b>35</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **3 (tiga)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **57,71%**





## 3.1.1.11 Perjanjian Kinerja Ke sebelas : Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi untuk Mendorong dan membangun Konektivitas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
11. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	2,280,708	2.281.290	100,22	2,685,511	1.645.350	61,26
	PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,321,264	1.321.846	100,04	1,422,555	1.207.960	84,91
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	92	90	97,82	96	100	104,16
	Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	88	100	113,63	94	100	106,38



	Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	100	80	<b>80</b>	100	80	<b>80</b>
	Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	%	80	100	<b>125</b>	90	78	<b>83,33</b>
	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	%	88	100	<b>125</b>	94	80	<b>85,10</b>
	PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	Rp. Juta	3,232,411	2.372.670	<b>73,40</b>	3,561,476	2.475.890	<b>69,51</b>
	PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	Rp. Juta	1,648,452	186.720	<b>11,32</b>	631.270	191.420	<b>30,32</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **9 (sembilan)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **78,33%**

3.1.1.12 Perjanjian Kinerja Ke duabelas : *Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi untuk Mendorong dan membangun Konektivitas*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
12. Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitasi dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (Media online)	hari	365	365	100	365	365	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	kegiatan	12	12	100	12	12	100



	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	kegiatan	12	12	100	12	12	100
	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	%	70	85,68	122,4	70,63	85	120,3
	PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Juta	102,667	85.210	82,99	100,067	91.780	91,71
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	%	0,33	0,31	93,93	0,32	0,31	96,87

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 8 (*delapan*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 101.11%



3.1.1.13 Perjanjian Kinerja Ke tigabelas : Terlaksananya Pembangunan dan Peingkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
13.	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan				98,16			73,65
		a. Baik	%	45	53,69	119,31	49,28	46,77	94,90
		b. Sedang	%	27,93	17,82	63,80	26,11	12,79	48,98
		c. Buruk	%	12,40	11,66	94,03	11,46	11,98	104,53
		d. Rusak Berat	%	14,57	16,83	115,51	13,15	28,46	46,20
		PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	2,280,708	1.501.250	65,82	2,685,511	1.645.350	61,26
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Juta	1,321,254	1.131.860	85,66	1,422,511	1.207.960	84,91
		Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	%	72,83	71,51	98,18	75,38	59,56	79,01
		Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan PusatProduksi di Wilayah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
		PDRB ADHB Sektor Bangunan	Rp. Juta	1,839,762	1.515.870	78,14	2,140,674	1.511.070	70,58
PDRB ADHK Sektor Bangunan	Rp. Juta	1,159,871	976.000	84,14	1,258,601	1.091.320	86,70		

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 68,15%



3.1.1.14 Perjanjian Kinerja Ke empatbelas : *Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
14.	Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	%	81,77	80	97,83	92,98	92,98	100
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	%	60	60,28	100,46	68,17	68,17	100
		Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	%	20	18,92	94,6	23,22	20,18	94,6
		Persentase Pengangkutan Sampah	%	70	72,27	103,24	79,07	74,56	103,24
		Persentase pengoperasian TPA	%	70	72,27	103,24	79,07	74,56	103,24
		Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	%	70	60	85,71	57,29	60	104,73





	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	%	60	66,67	<b>111,11</b>	68,17	173,73	<b>254,21</b>
	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	%	100	73,68	<b>73,68</b>	100	416,67	<b>416,67</b>
	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	%	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>
	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	%	80	75,30	<b>94,125</b>	90	78,40	<b>94,125</b>
	PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp. Juta	18,915	14	<b>74,01</b>	21,436	6,09	<b>28,41</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **136.29%**

3.1.1.15 Perjanjian Kinerja Ke limabelas : *Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktifitas dan mutu produk unggulan pertanian*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
15. Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	11,210,635	9.277.590	85,75	12,667,582	9.572.440	75,56
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,579,467	6.185.780	110,86	5,715,702	6.307.450	110,35
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,97	23	100,13	22,72	23	101,23
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,75	102,60	99,85	102,89	100.85	98,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 96,28%

3.1.1.16 Perjanjian Kinerja Ke enambelas : *Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi industri Pertanian*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
16	Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	11,210,635	9.277.590	82,75	12,667,582	9.572.440	75,56
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,579,467	6.185.780	110,86	5,715,702	6.307.450	110,35
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,97	23	100,13	22,72	22	96,83
		Nilai Tukar Petani	Indeks	102,75	105,09	102,27	102,89	100.85	98,01
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,648,452	1.518.810	92,13	1,787,882	1.660.920	92,89
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,229,414	1.208.450	98,29	1,278,875	1,293.390	101,13
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,72	98,63	0,73	0,70	95,89

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 95,80 %

3.1.1.17 Perjanjian Kinerja Ke tujuhbelas : *Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
17. <b>Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis Pemberdayaan masyarakat</b>	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	11,210,635	9.277.590	82,75	12,667,582	9.572.440	82,75
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,579,467	6.185.780	110,86	5,715,702	6.307.450	110,86
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,97	25,28	110,05	22,72	23	110,05
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,75	105,09	102,27	102,89	100,85	98,01
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	%	100	88,8	88,8	100	88	88
	Penguatan cadangan pangan	%	86,70	86,70	100	93,11	86	92,36
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	100	93	93	100	93	93
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	35	35	100	35	35



	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100	80,3	<b>80,3</b>	100	80,3	<b>80,3</b>
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	<b>100</b>	100	60	<b>60</b>
	Penanganan daerah rawan pangan	%	86,70	75	<b>86,50</b>	93,11	60	<b>64,43</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **83.16%**



3.1.1.18 Perjanjian Kinerja Ke delapanbelas : *Meningkatnya Pengelolaan dan Produk Maritim Bisnis*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
18. <b>Meningkatnya pengelolaan dan produk maritim bisnis</b>	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	11,210,635	9.277.590	82,75	14,316,970	9.572.440	66,86
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,579,467	6.185.780	110,86	5,857,087	6.307.450	107,68
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,97	25,28	110,05	22,47	23	102,35
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,648,452	1.518.810	92,13	1,939,524	1.660.920	80,63
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1,290,414	1.208.450	93,64	1,330,739	1.293.390	97,19
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	%	0,73	0,72	98,63	0,73	0,70	95,89

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **6 (enam)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **91,77%**

3.1.1.19 Perjanjian Kinerja Ke sembilanbelas : *Meningkatnya Pengelolaan dan Produk Maritim Bisnis*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALIASI		TARGET	REALIASI	
19.	Meningkatnya sarana dan prasarana maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	11,210,635	9.277.590	82,75	12,667,582	9.572.440	75,56
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rp. Juta	5,579,467	6.185.780	110,86	5,715,702	6.307.450	110,35
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	22,97	25,28	110,05	22,72	23	101,23

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **3 (tiga)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **95,72%**



3.1.1.20 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh : *Meningkatnya Kualitas Kawasan/ Destinasi Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
20. Meningkatkan kualitas kawasan/ destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	5,700,002	2.369.966	41,57	6,504,095	1.820.693	27,99
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,27	1,3	102,36	1,34	1,34	100
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	397,294	285.520	71,86	462,681	311.090	67,23
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	213,383	200.830	94,11	227,467	214.570	94,33

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 72,38%

3.1.1.21 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh satu : *Menguatnya SDM Pelaku/ Masyarakat Wisata*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
21.	Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	Orang	5,700,002	2.369.966	41,57	6,504,095	1.820.693	27,99
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,27	1,3	102,36	1,34	1,34	100
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	397,294	285.520	71,86	462,681	325.681	70,38
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	213,383	200.830	94,11	227,467	207.000	91,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **4 (empat)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **72,34%**

3.1.1.22 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh dua : *Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
22. <b>Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata</b>	Jumlah Wisatawan	Orang	5,700,002	2.369.966	<b>41,57</b>	6,504,095	1.820.693	<b>27,99</b>
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,27	1,3	<b>102,36</b>	1,34	1,34	<b>100</b>
	PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	397,294	285.520	<b>71,86</b>	462,681	311.090	<b>67,23</b>
	PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	Rp. Juta	213,383	200.830	<b>94,11</b>	227,467	204.570	<b>89,93</b>
	Cakupan kajian seni 50%	%	100	50	<b>100</b>	100	50	<b>100</b>
	Cakupan fasilitasi seni 30%	%	100	15	<b>50</b>	100	15	<b>50</b>
	Cakupan gelar seni 75%	%	100	50	<b>66,6</b>	100	60	<b>60</b>
	Misi kesenian 100%	%	100	80	<b>80</b>	100	70	<b>70</b>
	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	%	100	25	<b>100</b>	100	25	<b>100</b>
	Cakupan tempat 100%	%	100	70	<b>70</b>	100	70	<b>70</b>
	Cakupan organisasi 34%	%	100	20	<b>58,82</b>	100	25	<b>73,52</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **73,52%**

3.1.1.23 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tiga : *Meningkatnya Kelembagaan, jaringan dan investasi industry pertanian.*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
23. Meningkatkan kelembagaan, jaringan dan investasi industri pertanian	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	1,236,172	977.640	79,08	1,434,786	1.079.070	75,20
	PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	Rp. Juta	718,322	649.400	90,40	777,622	689.740	88,69
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	%	5,00	3,55	71	5,12	3,2	62,5
	Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	Indeks	63,32	65,57	103,55	63,59	65,95	103,71

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **4 (empat)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **82,525%**

3.1.1.24 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh empat : *Meningkatnya Inovasi pada sektor Agro, Maritim dan Wisata*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
24. Meningkatkan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	9.911.189	8,376.590	84,51	12,667,582	9.572.440	75,56
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	5.443.046	5,753.410	105,33	5,715,702	6.307.450	110,35
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	23,23	25,28	109,91	22,72	23	101,09
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.518.354	1.067.899	70,33	1,939,524	1.660.192	85,59
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	Rp. Juta	1.181.121	1,153.090	97,62	1,330,739	1.293.390	97,19
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	%	0,74	0,72	97,29	0,73	0,70	95,89
	Nilai Tukar Petani	Indeks	102,60	101,54	98,96	102,89	100.85	98,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **94,81%**

3.1.1.25 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh lima : *Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Melayani*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
25	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
		Kapabilitas APIP	Level	Level 3 DCT	Level 3	100	Level 3 DCT	Level 3	100
		Opini LKPD	Tingkat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Nilai SAKIP		B	BB	150	BB	BB	100
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan public	%	74,38	81,03	108,94	82,00	80,19	97,79
		Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	81,59	80,20	98,29	90,53	80	88,36
		PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp. Juta	2,129,491	1.591.240	74,72	3,006,082	1.742.980	57,98
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	%	1,169,326	430.105,85	36,78	1,339,169		



	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365	100	365,00	365	100
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12	100
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12	12	100	12	12	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **11 (sebelas)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **85.83%**



3.1.1.26 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh enam : *Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
26	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD	Tingkat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
		Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp. Milyar	229.068.192.270,00	218.326.857.894,91	95,31	229.068.192.270,00	218.161.098.752	95,23
		Persentase kenaikan PAD	%	75,00	95,31	127,08	125,00	86,72	69,36
		Alokasi anggaran untuk pembangunan	%	899.000.000.000	1.037.937.984.690	115,45	899.000.000.000	817.904.587.471	90,97

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 4 (*empat*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah 88.89%



3.1.1.27 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tujuh : Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
27 Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	Rp. Juta	69,611	16,558,54	23,78	91,100	64.890	71,22
	PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp. Juta	683,121	184,233,86	26,97	849,128	717.370	84,48
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	%	0,89	0,23	25,84	0,85	0,23	27,05
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	3,54	2,57	72,59	3,34	2,57	76,94
	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	Rp. Juta	9,911,189	2.609.724,22	26,33	12,667,582	9.572.440	75,56
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	%	23,23	25,28	108,82	22,72	23	108,82
	Kemampuan Investasi	Rp. Miliar	645.500.000 .000	675.850.158. 595	104,70	650.020.000 .000	726.842.910. 458,00	111,81

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **79,41%**

3.1.1.28 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh delapan : *Terciptanya masyarakat yang demokratis*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik	%	78,10	81,03	103,75	82,00	80,19	97,79
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	hari	365,00	365	100	365,00	365	100
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melaluimedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12	100
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	kegiatan	12,00	12	100	12,00	12	100



	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	%	88,00	85	<b>96,59</b>	94,00	69,92	<b>74,06</b>
	Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	Kali		0	<b>100</b>	-	0	<b>100</b>
	Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	%	68,96	76	<b>110,20</b>	68,96	78,28	<b>113,51</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 7 (*tujuh*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **97,90%**

3.1.1.29 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh sembilan : *Terciptanya supremasi hukum*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level	Level 3	3	100	Level 3	Level 3	100
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten/Kota	%	95,43	90,76	95,10	98,45	37	37,58
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	%	87,47	90	102,89	95,64	100	104,55
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	100	90	90	100	100	100
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patroli/hari/orang	100	90	90	100	30	30

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 5 (*lima*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **74.42%**



## 3.1.1.30 Perjanjian Kinerja Ke tiga puluh : Pengurangan Resiko Bencana

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	95,43	35	36,67	98,45	85	86,33
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layananWilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,47	30	34,29	95,64	85	88,87
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	99,25	20	20,15	99,75	33,33	33,41
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter padaWMK	%	100	60	60	100	60	60
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	%	80,73	50	61,93	93,11		
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	%	93,87	90	95,87	97,91	85	85,81
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	%	93,87	90	95,87	97,91	85	86,81

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 6 (*enam*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **73,53%**

### 3.2 PENCAPAIAN KINERJA

#### 3.2.1 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI

Evaluasi capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021, didasarkan pada capaian rata-rata nilai misi Kabupaten Pandeglang yang dihitung berdasarkan capaian sasaran strategis Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Pencapaian misi pertama yaitu *“Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat;
  - b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat;
  - c. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Meningkatnya fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar;
  - e. Meningkatnya implementasi norma agama;
  - f. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga;
  - g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi;
  - i. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah;
  - j. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.



Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **95,19 %** dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi pertama. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Pertama

Misi ke 1	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2020
<b>Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat</b>	1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat	95,40	1,090	104,02	<b>100,30</b>	<b>95,19</b>
	2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat	94,23	1,077	101,48		
	3. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat	82,1	0,94	77,174		
	4. Meningkatkan fungsi serta sarana dan prasarana perdagangan dan pasar	48,76	0,56	27,3		
	5. Meningkatnya Implementasi norma agama	81,28	0,93	75,6		
	6. Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga	151,5	1,73	262,3		
	7. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	89,58	1,028	92,12		
	8. Terkendalinya angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi	84,94	0,97	82,44		
	9. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah	89,42	1,022	91,39		
	10. Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat	57,71	0,65	38,06		

**sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis**

- Pencapaian misi kedua yaitu “ *Membangun Konektivitas Wilayah*” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah;
  - Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar;
  - Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan;
  - Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah **102,53%** dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kedua. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.12.

**Tabel 3.12**  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Kedua

Misi ke-2	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2020
<i>Membangun Konektivitas Wilayah</i>	1. Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi untuk mendorong dan membangun konektivitas wilayah	78,33	0,81	63,44	<b>92,09</b>	<b>102,53</b>
	2. Terlaksananya pembangunan dan penataan, fasilitasi dan koordinasi untuk menjadikan aktivitas perekonomian lancar	101,11	1,05	106,16		
	3. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana khususnya jalan menuju kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan	68,15	0,71	48,38		
	4. Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup	136,29	1,41	192,16		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi ketiga yaitu *"Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian"* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
  - a. Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian;
  - b. Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian;
  - c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **92.25** dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi ketiga. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi ketiga dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.13.

**Tabel 3.13**  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Ketiga

Misi ke-3	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian	1 Tercapainya ketersediaan, dan peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	96,23	1,05	100,94	95,49	92,25
	2 Meningkatnya jaringan kelembangan dan investasi industri pertanian	95,80	1,045	100,11		
	3 Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	83,16	0.91	75,68		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi keempat yaitu *"Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim"* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya pengelolaan dan produk maritimbisnis;
  - b. Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **93.83 %**, dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keempat. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keempat dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.14.

**Tabel 3.14**  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keempat

Misi ke-4	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim	1 Meningkatkan pengelolaan dan produk maritimbisnis	91.77	0,98	89,934	99,58	93,83
	2 Meningkatkan sarana dan prasarana maritimbisnis	95.72	1,021	97,73		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi kelima yaitu *"Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata,"* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas kawasan/destinasi wisata;
  - b. Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata;
  - c. Meningkatkan manajemen pengelolaan objek wisata.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **73,05 %**, dengan kriteria *baik*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kelima. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi kelima dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.15.

**Tabel 3.15**  
Target, Realisasi dan Capaian kinerja Misi Kelima

Misi ke-5	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020
<i>Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata</i>	1 Meningkatkan kualitas kawasan/destinasi wisata	72,38	0.995	73,01	<b>77,03</b>	<b>73,05</b>
	2 Menguatnya SDM pelaku/masyarakat wisata	72,34	0.994	71,90		
	3 Meningkatkan manajemen pengelolaan objek wisata	73,52	1.010	74,25		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi keenam yaitu *"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah"* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi;
  - b. Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata;
  - c. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani;
  - d. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
  - e. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
  - f. Terciptanya masyarakat yang demokratis;
  - g. Terciptanya supremasi hukum;
  - h. Berkurangnya resiko bencana.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah **85,61%**, dengan kriteria *Memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keenam. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keenam dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.16.

**Tabel 3.16**  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keenam

Misi ke-6	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Tingkat Capaian	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2019	Capaian Kinerja Berdasarkan Misi Tahun 2020
<i>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah</i>	1 Meningkatkan kelembagaan, jaringan dan budaya inovasi	82,525	0,98	80,88	<b>89,35</b>	<b>85, 61</b>
	2 Meningkatnya inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	94,81	1,12	106,18		
	3 Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	85,83	1,014	87,03		
	4 Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	88,89	1,05	93,33		
	5 Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	79,41	0,94	74,64		
	6 Terciptanya masyarakat yang demokratis	97,90	1,16	113,56		
	7 Terciptanya supremasi hukum	74,42	0,88	65,49		
	8 Berkurangnya resiko bencana	73,53	0,87	63,97		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

### 3.1.4 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI

Capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil perkalian antara nilai capaian tiap misi dengan bobot atas dasar kedekatan dengan visi. Gambaran lebih jelasnya mengenai capaian nilai kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.17 berikut ini.

**Tabel 3.17**  
Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Kabupaten Pandeglang

No	Misi	Capaian Misi	Bobot	Nilai Misi	Capaian Kinerja berdasarkan Visi Tahun 2019	Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Tahun 2020
1	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	95,19	1,053	100,23	<b>92,96</b>	<b>91,33</b>
2	Membangun konektivitas wilayah	102,53	1,134	116,27		
3	Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian	92,25	1,020	94,095		
4	Meningkatkan nilai tambah sektor maritime	93,83	1,037	97,30		
5	Modernisasi pengelolaan potensi wisata	73,05	0,808	59,02		
6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem inovasi daerah	85,61	0,947	81,07		

**Sumber :** RPJMD Kabupaten Pandeglang 2016-2021, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis



### 3.3. REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PANDEGLANG

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada fungsi alokasi karena lebih mengetahui kebutuhan serta Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Secara keseluruhan, APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 dapat di rinci sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta disesuaikan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan produk hukum aturan pengelolaan keuangan yang lebih tinggi. Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

##### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD Yang Sah

**2) Dana Perimbangan**

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)

**3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Bantuan Keuangan

**a. Target dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2020 terealisasi sebesar **Rp 2.444.108.724.965,47** atau 98,01% dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 2.493.697.992.758,38**. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2018 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.18**

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020

*(Dalam Rupiah)*

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.493.697.992.758,38</b>	<b>2.444.108.724.965,47</b>	<b>98,01</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>218.161.098.752,38</b>	<b>189.186.452.711,47</b>	<b>86,72</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	36.421.209.547,43	37.216.262.945,00	102,18
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	23.606.280.787,75	14.129.729.794,00	59,86
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.463.831.963,00	13.463.831.963,00	100,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	144.669.776.454,20	124.376.628.009,47	85,97
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.664.344.877.842,00</b>	<b>1.640.877.286.822,00</b>	<b>98,59</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	78.499.358.842,00	79.219.492.744,00	100,92
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.125.384.369.000,00	1.107.241.659.000,00	98,39
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	460.461.150.000,00	454.416.135.078,00	98,69
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>611.192.016.164,00</b>	<b>614.044.985.432,00</b>	<b>100,44</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	186.648.247.061,00	195.556.671.313,00	104,68
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.592.201.103,00	68.536.746.119,00	91,88
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	294.951.568.000,00	294.951.568.000,00	100,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	100,00

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2020 (unaudited)

#### 4) Belanja Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2020, belanja daerah terealisasi sebesar Rp2.623.024.102.906,23 atau 95,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.508.587.723.650,00. secara umum target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 3.19**  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.623.024.102.906,23</b>	<b>2.508.587.723.650,00</b>	<b>95,64</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.761.993.736.879,94</b>	<b>1.690.683.136.179,00</b>	<b>95,95</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.136.501.761.847,14	1.095.897.019.491,00	96,43
5.1.2.	Belanja Bunga	250.000.000,00	60.306.257,00	24,12
5.1.4.	Belanja Hibah	133.344.882.750,00	130.300.575.100,00	97,72
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	11.880.000.000,00	11.821.159.383,00	99,50
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.002.750.000,00	6.002.566.100,00	100,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	388.243.712.170,00	387.917.100.770,00	99,92
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	85.770.630.112,80	58.684.409.078,00	68,42
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>861.030.366.026,29</b>	<b>817.724.587.471,00</b>	<b>94,99</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	127.299.599.748,00	108.559.676.993,00	85,28
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.448.850.389,20	485.144.691.779,00	94,49
5.2.3.	Belanja Modal	220.281.915.889,09	224.020.218.699,00	101,78
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(129.326.110.147,85)</b>	<b>(64.478.998.684,53)</b>	<b>49,86</b>

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2020 (unaudited)

**5) Pembiayaan Daerah**

Realisasi penerimaan pembiayaan dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel. 3.20**

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(129.326.110.147,85)</b>	<b>(64.478.998.684,53)</b>	<b>50,31</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>129.326.110.147,85</b>	<b>129.326.110.147,85</b>	<b>100,01</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>129.326.110.147,85</b>	<b>129.565.070.878,85</b>	<b>49,86</b>
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129.326.110.147,85	129.565.070.878,85	100,18
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah			
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>129.326.110.147,85</b>	<b>129.565.070.878,85</b>	<b>100,18</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0</b>	<b>65.086.072.194,32</b>	<b>0</b>

**Sumber:** BPKD Kabupaten Pandeglang 2020 (unaudited)**Saldo Kas**

Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 menghasilkan saldo kas sebesar Rp. 0 Sisa ini didapat dari selisih antara surplus belanja daerah ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 3.21**Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
21.	Pendapatan	2.493.697.992.758,38
2.	Belanja	2.623.024.102.906,23
3.	Surplus/Defisit	(129.326.110.147,85)
4.	Pembiayaan Netto	129.326.110.147,850
5.	Sisa Perhitungan APBD	0

**Sumber:** BPKD Kabupaten Pandeglang 2020

Pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilaksanakan, namun sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bernuansa lebih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan pokok Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah telah melaksanakan restrukturisasi Anggaran Pendapatan Daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Pandeglang dewasa ini tidak hanya mengacu kepada satu peraturan perundangan saja (*omnibus regulations*) melainkan juga mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menghasilkan sistem akuntansi yang lebih kompatibel, komprehensif dan bertanggungjawab. Selain itu, banyaknya dasar hukum yang dijadikan acuan (konsideran) dalam penyusunan APBD ini diharapkan juga akan mampu memberikan beberapa aspek positif, antara lain:

1. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Adanya Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan;
3. Memberikan arah sekaligus tidak membingungkan pihak pelaksana dan
4. Pemeriksa keuangan;
5. Memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan 139 program, 30 sasaran strategis, 33 urusan pemerintah daerah dan 9 fungsi. Program/ kegiatan tersebut mendorong/ menstimulus nilai kinerja sasaran terhadap pencapaian visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 sebesar **91,33%** dan masuk pada kategori “memuaskan”.

Dilihat dari pencapaian keseluruhan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 ini masih perlu adanya penyempurnaan dan peningkatan secara optimal, berdasarkan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, komponen tersebut :

- a. Perencanaan
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaksanaan Perencanaan
- d. Evaluasi, dan
- e. Pelaporan

Komponen – komponen tersebut harus dievaluasi kembali agar penerapan Sistem AKIP dapat lebih sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pembangunan khususnya yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang (RPJMD)

#### 4.2 SARAN

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis di tahun berikutnya yang merupakan pelaksanaan tahun ke lima atau transisi dari periode RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, pencapaian indikator-indikator sasaran strategis, diharapkan agar memperoleh nilai pencapaian yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembangunan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam semua tahap pembangunan yang lebih intensif antar instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam memperkuat pencapaian nilai akuntabilitas kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya evaluasi dan kajian kembali terhadap rencana strategis, indikator kerja, rencana kerja, dan perjanjian kinerja SKPD untuk lebih melihat dan menilai keselarasan program-program SKPD dengan RPJMD dan konektivitas program antar SKPD yang mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.





## **BUPATI PANDEGLANG**

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRNA NARULITA, SE, MM

Jabatan : BUPATI PANDEGLANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pandeglang, Februari 2020

**BUPATI PANDEGLANG,**

**IRNA NARULITA, SE, MM**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Kepada Seluruh Masyarakat	- Angka Partisipasi Sekolah		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	100,00	%
		- Angka Partisipasi Murni		
		a. SD Sederajat	94,79	%
		b. SMP Sederajat	74,96	%
		- Angka Partisipasi Kasar		
		a. SD Sederajat	100,00	%
		b. SMP Sederajat	83,84	%
		- Angka Melek Huruf	100,00	%
		- Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	Tahun
		- Indeks Pendidikan	65,62	Indeks
		- PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,434,786	Rp. Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	777,622	Rp. Juta
- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor	5,12	%		
2.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	- Angka Harapan Hidup	65,39	Tahun
		- Angka Kesakitan	20,51	%
		- Rata-rata lama sakit	4,15	Hari
		- Persentasi Balita Gizi Buruk	0,66	%
		Indeks Angka Harapan Hidup /Indeks Kesehatan	68,34	Indeks
		- PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	384,895	Rp. Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	227,725	Rp. Juta
3.	Tertanggulangnya Kemiskinan dan Pengangguran yang Diprioritaskan Pada Kantong- kantong Kemiskinan dengan Memprioritaskan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Penduduk Miskin	99,619	Jiwa
		- Persentasi Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	7,45	%
		- Tingkat Pengangguran Terbuka	8,06	%
		- Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
		- Indeks Gini Rasio	0,18	Indeks

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
4.	Meningkatkannya Fungsi Serta Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Pasar	Tingkat Inflasi	8,30	%
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91,100	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.657.850	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Perusahaan	48,629	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Perusahaan	0,85	%
5.	Meningkatnya Implementasi Norma Agama	Jumlah Fasilitas/ Bantuan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keagamaan	100	Lembaga/ Organisasi
		Tidak Terjadinya Konflik Umat Beragama Skala Provinsi dan Nasional	-	Kali
		Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	91	Kali
		Angka Partisipasi Sekolah MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Partisipasi Murni MI / SD Sederajat	98,44	%
		Angka Partisipasi Kasar MI / SD Sederajat	100,00	%
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,90	Tahun
		Indeks Pendidikan	65,62	Indeks
6.	Meningkatnya Kapasitas Pemuda Berprestasi dan Sarana Olahraga	Juara Olahraga Tingkat Provinsi / Nasional	3	Cabang
		Pembangunan dan Pemanfaatan GOR Multiguna Sebagai Gedung Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	2	Unit
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan	5	Penghargaan
		Jumlah Fasilitas Pengembangan Pemuda dan Pusat Kreasi dan Inovasi Pemuda	20	Fasilitas/ Kegiatan
		Jumlah Fasilitas Olahraga	11	
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di PUSKESMAS mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100,00	%
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	99,00	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	99,00	%
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100,00	%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	94,00	%
		Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	94,00	%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100,00	%
8.	Terkendalinya Angka Kelahiran dengan Meningkatkan Kualitas Reproduksi	Jumlah Penduduk	1.336.476	Jiwa
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	%
		Jumlah Rumah Tangga	388.515	KK
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun 3,5%	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%.	100,00	%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) 5%	100,00	%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB 70%	100,00	%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100,00	%
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100,00	%
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu)petugas di setiap Desa/ Kelurahan.	100,00	%
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat 30% Setiap Tahun	100,00	%
		Data Mikro Kelurga di setiap Desa/Kelurahan 100% di Setiap Tahun	100,00	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terselenggaranya Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional	1	1 Kali/ Tahun
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1.787.882	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.853.035	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.875	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, danReparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.657.850	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks
10.	Meningkatnya Etos Kerja dan Produktivitas Masyarakat	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisKompetensi	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan BerbasisMasyarakat	100,00	%
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan PelatihanKewirausahaan	100,00	%
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	90,00	%
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	100,00	%
		Besaran Pekerja/buruh yang Menjadi Peserta ProgramJamsostek	100,00	%
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	89,00	%
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	90,00	%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN

11.	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Untuk Mendorong dan Membangun Konektivitas	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2,685,511	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,422,555	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,58	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	96,00	%
		Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Jaringan Trayek yang Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang Telah Berkembang pada Wilayah yang telah Tersedia Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Tersedianya Halte pada Setiap Kabupaten/Kota yang Telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	100,00	%
		Tersedianya Terminal Angkutan Penumpang pada Setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	90,00	%
		Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka dan Guardrail) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Jalan Kabupaten/Kota	94,00	%
		Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angk' Tersedianya Kapal Laut yang Beroperasi pada Lintas atau Trayek dalam Kabupaten/ Kota untuk Menghubungkan Daerah Tertinggal dan Terpencil dengan Wilayah yang telah Berkembang pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	100	%
		Tersedianya Dermaga pada setiap Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/kota untuk Melayani Kapal Laut yang Beroperasi pada Trayek dalam Kabupaten/Kota pada Wilayah yang Memiliki Alur Pelayaran dan tidak ada Alternatif Angkutan Jalan	94,00	%
		Rasio Elektrifikasi	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Pertambangan & Penggalian	3,561,478	Rp. Juta
		PDRB ADHB Sektor Listrik dan Gas	631,270	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertambangan & Penggalian	1.836.424	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1.278.874.56	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertambangan & Penggalian	60,19	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0.73	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
12.	Terlaksananya Pembangunan dan Penataan, Fasilitas dan Koordinasi untuk Menjadikan Aktivitas Perekonomian Lancar	Media Massa Seperti Majalah, Radio dan Televisi	12,00	Kegiatan
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Baru seperti Website (media online)	365,00	Hari
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Tradisional Seperti Pertunjukan Rakyat	12,00	Kegiatan
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Interpersonal seperti Sarasehan, Ceramah/Diskusi dan Lokakarya	12,00	Kegiatan
		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media Luar Ruang Seperti Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk dan Baliho	12,00	Kegiatan
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi di Tingkat Kecamatan	94,00	%
		Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangannya	70,63	%
		PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	100,067	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Informasi dan Komunikasi	124.536	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Informasi dan Komunikasi	0,32	%
13.	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Khususnya Jalan Menuju Kawasan Agribisnis, Destinasi Pariwisata dan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Kondisi jalan		
		a. Baik	49,28	%
		b. Sedang	26,11	%
		c. Buruk	11,46	%
		d. Rusak Berat	13,15	%
		PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	2,685,511	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan	14,225,555	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Transportasi dan Pergudangan	1,58	%
		Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang	75,38	%
		Persentase Terhubungnya Pusat-pusat Kegiatan dan Pusat Produksi di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	%
		PDRB ADHB Sektor Bangunan	2,140,674	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Bangunan	1,258,601	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,87	%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
14. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan, Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Serta Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air minum yang aman	92,98	%
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	68,17	%
	Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan	23,22	%
	Persentase Pengangkutan Sampah	79,07	%
	Persentase pengoperasian TPA	79,07	%
	Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) Lebih dari 2 Kali Setahun	57,29	%
	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang Diterbitkan	68,17	%
	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		%
	Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	68,17	%
	Persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100	%
	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital	100,00	%
	Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20%	90,00	%
	PDRB ADHB Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,436	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,287	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,43	%
15. Tercapainya ketersediaan, dan Peningkatan produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,667,582	Rp. Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp. Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
	Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
16.	Meningkatnya Jaringan Kelembagaan dan Investasi Industri Pertanian	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,667,582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,787,882	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,278,875	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%
17.	Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,667,582	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
		Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
		Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00	%
		Penguatan cadangan pangan	93,11	%
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100,00	%
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100,00	%
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100,00	%
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	%
18.	Meningkatnya pengelolaan dan produk maritim bisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,316,970	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,857,087	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,47	%
		PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp. Juta
		PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp. Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Industri Pengolahan	0,73	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
19.	Meningkatnya sarana dan prasarana maritimbisnis	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,667,582	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,715,702	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
20.	Meningkatnya kualitas kawasan/destinasi wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462,681	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227,467	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,84	%
21.	Menguatnya SDM Pelaku/masyarakat Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462,681	Rp.Juta
		- PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227,467	Rp.Juta
		- Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,84	%
22.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Objek Wisata	Jumlah Wisatawan	6,504,095	Orang
		Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,34	Hari
		PDRB ADHB Sektor Jasa Lainnya	462,681	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya	227,467	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Lainnya	2,84	%
		Cakupan kajian seni 50%	100,00	
		Cakupan fasilitasi seni 30%	100,00	
		Cakupan gelar seni 75%	100,00	
		Misi kesenian 100%	100,00	
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100,00	
		Cakupan tempat 100%	100,00	
		Cakupan organisasi 34%	100,00	
23.	Meningkatnya kelembagaan, jaringan dan	PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan	1,434,786	Rp.Juta
		PDRB ADHK Sektor Jasa Pendidikan	777,622	Rp.Juta
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Pendidikan	5,12	%
		Indeks Tingkat Daya Beli / Pengeluaran	63,59	Indeks

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
24. Meningkatkan inovasi pada sektor agro, maritim dan wisata	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12,667,582	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	5,715,702	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	%
	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	1,939,524	Rp.Juta
	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan	1,330,739	Rp.Juta
	Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor industri pengolahan	0,73	%
	Nilai Tukar Petani	102,89	Indeks
25. Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani	- Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
	- Kapabilitas APIP	Level 3	Level
	- Opini LKD	WTP	Nilai
	- Nilai SAKIP	BB	Nilai
	- Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas pelayanan publik	82,00	%
	- Rata-rata Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	90,53	%
	-PDRB ADHB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,006,082	jt
	-PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,339,169	jt
	-Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	15,89	share
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kali
	- Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kali
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	94,00	%
26. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Opini LKD	WTP	Nilai
	Peningkatan Pendapatan Daerah		Jt
	Persentase kenaikan PAD	125,00	%
	Rasio Kemandirian Daerah	9,66	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
27	Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah	PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan	91,100	Jt
		PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	849,128	Jt
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor jasa perusahaan	0,85	NTB
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	3,45	NTB
		PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12,667,582	%
		Share NTB Kabupaten Terhadap NTB Provinsi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,72	Share
		Kemampuan Investasi	650,02	%
28	Terciptanya masyarakat yang demokratis	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kulaitas Pelayanan Publik	82,00	%
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	365,00	hari
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melaluimedia interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12,00	kegiatan
		Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12,00	kegiatan
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	94,00	%
		Tidak terjadinya konflik bernuansa suku, ras dan antargolongan, konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme	-	
		Tingkat Partisipasi Politik Pemilu	-	%
29	Terciptanya Supremasi hukum	Implementasi Maturitas Level SPIP	Level 3	level
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten/Kota	98,45	%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ Kota	95,64	%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100,00	%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100,00	%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
30	Pengurangan Risiko Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	98,45	%
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95,64	%
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	99,75	%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 - 5000 liter pada WMK	100,00	%
		Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	97,91	%
		Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	97,91	%
		Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	97,91	%
		Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	93,11	%
		Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	97,91	%
		Evakuasi korban bencana skala provinsi	97,91	%
		Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	62,59	%

Sasaran ini didukung oleh Anggaran Organisasi Perangkat Daerah:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	4,747,817,000.00		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar/Menengah	38,889,798,160.00		
	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	690,000,000.00		
	Program Peningkatan Layanan Pendidikan	175,000,000.00		
	Program Bantuan Operasional Sekolah	143,475,800,000.00		
	KESEHATAN	333,689,734,398.00		
	Dinas Kesehatan	224,263,819,423.00		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	151,394,200,273.00		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	5,032,607,600.00		
	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	60,820,732,000.00		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1,994,000,000.00		
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah	109,425,914,975.00		
	Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	32,602,510,000.00		
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	195,000,000.00		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	75,154,404,975.00		
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	56,677,257,055.00		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56,677,257,055.00		
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,087,332,055.00		



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	36,971,525,000.00		
	Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Ke-PU-an	130,000,000.00		
	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	381,000,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	7,265,400,000.00		
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58,393,984,675.00		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	58,393,984,675.00		
	Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	55,352,844,855.00		
	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	82,392,761,000.00		
	Satuan Polisi Pamong Praja	2,238,000,000.00		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	153,163,500.00		
	Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,126,397,000.00		
	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat	9,830,000.00		
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,154,761,000.00		
	Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pra, Saat (Tanggap Darurat) dan Pasca Bencana)	76,589,761,000.00		
	SOSIAL	3,741,598,570.00		
	Dinas Sosial	3,741,598,570.00		
	Program Penanggulangan Kemiskinan	1,108,598,570.00		
	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	600,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Program Sarana dan Prasarana Sosial	330,000,000.00		
	Program Pemberdayaan Masyarakat	445,000,000.00		
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	59,605,167,000.00		
	TENAGA KERJA	1,502,000,000.00		
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,502,000,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	540,750,000.00		
	Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	210,500,000.00		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	138,000,000.00		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	676,474,500.00		
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	676,474,500.00		
	Program Pengarusutamaan Gender	120,000,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	220,000,000.00		
	Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	336,474,500.00		
	PANGAN	1,898,000,000.00		
	Dinas Ketahanan Pangan	1,898,000,000.00		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	900,000,000.00		
	PERTANAHAN	1,590,750,000.00		
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1,590,750,000.00		
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1,590,750,000.00		
	LINGKUNGAN HIDUP	4,813,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Dinas Lingkungan Hidup	4,813,000,000.00		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	50,000,000.00		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	354,975,000.00		
	Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH)	150,000,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	100,000,000.00		
	Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	3,031,462,400.00		
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,418,552,000.00		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,418,552,000.00		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4,533,552,000.00		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,558,000,000.00		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2,558,000,000.00		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	500,000,000.00		
	Program Pengentasan Desa Tertinggal	35,000,000.00		
	Program Pengentasan Desa Tertinggal	35,000,000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1,135,000,000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	1,135,000,000.00		
	Program Pemberdayaan Ekonomi	120,000,000.00		
	Program Pemberdayaan Ekonomi	120,000,000.00		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	100,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	100,000,000.00		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,525,849,500.00		
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	13,525,849,500.00		
Program Keluarga Berencana	11,772,074,000.00		
Program Ketahanan Keluarga	140,000,000.00		
Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR	200,000,000.00		
PERHUBUNGAN	10,792,389,000.00		
Dinas Perhubungan	10,792,389,000.00		
Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	30,000,000.00		
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	4,116,135,500.00		
KOMUNIKASI DAN INFORMASI	4,051,650,000.00		
Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	4,051,650,000.00		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3,752,650,000.00		
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1,437,358,000.00		
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1,437,358,000.00		
Penciptaan Iklim Usaha Koperasi yang Kondusif	222,300,000.00		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162,300,000.00		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	117,300,000.00		
Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	417,358,000.00		
PENANAMAN MODAL	4,676,395,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,910,395,000.00		
	Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	109,000,000.00		
	Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi	159,600,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	102,000,000.00		
	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	218,050,000.00		
	Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	766,000,000.00		
	Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	42,700,000.00		
	Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi	55,000,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60,400,000.00		
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	60,400,000.00		
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3,074,000,000.00		
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	465,000,000.00		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	70,000,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	35,500,000.00		
	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	50,000,000.00		
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	8,145,000.00		
	STATISTIK	45,000,000.00		
	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	195,000,000.00		
	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah	165,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	40,000,000.00		
	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah	30,000,000.00		
	PERSANDIAN	10,000,000.00		
	Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik	10,000,000.00		
	Program Tata Kelola Persandian Daerah	10,000,000.00		
	KEBUDAYAAN	10,000,000.00		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650,000,000.00		
	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	650,000,000.00		
	PERPUSTAKAAN	50,000,000.00		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,568,772,000.00		
	Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	448,215,200.00		
	KEARSIPAN	37,266,000.00		
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	166,977,000.00		
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip	166,977,000.00		
	URUSAN PILIHAN	27,463,000.00		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	47,547,500,000.00		
	Dinas Perikanan	3,538,757,000.00		
	Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	617,778,000.00		
	Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap	30,000,000.00		
	Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	1,573,757,000.00		
	PARIWISATA	10,000,000.00		
	Dinas Pariwisata	8,015,743,000.00		
	Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	535,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
		TARGET	SATUAN
Program Sarana dan Prasarana Wisata	961,404,000.00		
Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata	4,017,819,000.00		
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	50,000,000.00		
PERTANIAN	145,500,000.00		
Dinas Pertanian	33,396,000,000.00		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna	586,049,000.00		
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Berkelanjutan	20,000,000.00		
Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner	10,000,000.00		
Program Perluasan Jaringan Bisnis dan Pasar Produk Pertanian	10,000,000.00		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	15,000,000.00		
Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan	15,000,000.00		
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20,000,000.00		
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	10,000,000.00		
Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM Aneka dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi	10,000,000.00		
PERDAGANGAN	10,000,000.00		
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	555,000,000.00		
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	555,000,000.00		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	10,000,000.00		
Program Optimalisasi dan Pengembangan Gudang System Resi Gudang (SRG)	15,000,000.00		



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	10,000,000.00		
	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	110,000,000.00		
	PERINDUSTRIAN	35,000,000.00		
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	1,912,000,000.00		
	Program Pembangunan/ Pengembangan Sentra-sentra Industri/Usaha Potensial	420,000,000.00		
	TRANSMIGRASI	15,000,000.00		
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	120,000,000.00		
	Program Fasilitas Transmigrasi	120,000,000.00		
	PENUNJANG URUSAN	90,000,000.00		
	PERENCANAAN	26,379,421,000.00		
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,958,511,000.00		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	745,000,000.00		
	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek dan Pembangunan	330,000,000.00		
	Program Penguatan, Kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi	53,000,000.00		
	KEUANGAN	40,000,000.00		
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	11,994,500,000.00		
	Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,455,779,400.00		
	Program Pengelolaan Penganggaran Daerah	30,000,000.00		
	Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	68,825,000.00		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	38,054,000.00		
	Badan Pelayanan Pajak Daerah	50,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Program Layanan Dasar Perangkat Daerah	2,179,500,000.00		
	Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	675,000,000.00		
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	30,000,000.00		
	Badan Kepegawaian dan Diklat	7,426,410,000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	726,057,850.00		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	41,200,000.00		
	PENDUKUNG	1,512,388,200.00		
	SEKRETARIAT DAERAH	96,881,305,000.00		
	Sekretariat Daerah	32,841,705,000.00		
	Program Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	4,660,214,000.00		
	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	24,500,000.00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	133,300,000.00		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	86,300,000.00		
	Dokumentasi Hukum	1,300,000,000.00		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	146,940,000.00		
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	75,000,000.00		
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	85,700,000.00		
	Program Penataan Daerah	339,250,000.00		
	Program Pengembangan Otonomi Daerah	75,000,000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	75,000,000.00		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2020	
			TARGET	SATUAN
	Program Pengelolaan Penganggaran Daerah	118,100,000.00		
	Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	50,000,000.00		
	Program Pemberdayaan Ekonomi	98,550,000.00		
	Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri	100,000,000.00		
	Program Pengadministrasian Sumber Daya Alam	140,000,000.00		
	SEKRETARIAT DPRD	79,000,000.00		
	Sekretariat DPRD	56,000,000,000.00		
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	879,749,000.00		
	INSPEKTORAT	584,200,000.00		
	Inspektorat	8,039,600,000.00		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	584,584,360.00		

	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,267,435,000.00	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,267,435,000.00	
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik	315,000,000.00	
	Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan	66,290,000.00	
	Program Fasilitas Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat	118,000,000.00	

Pandeglang, Februari 2020  
BUPATI PANDEGLANG



Hj. IRMAWATI, SE., MM

**PENGHARGAAN- PENGHARGAAN TAHUN 2017- 2020**



Penghargaan Opini BPK WTP Kabupaten Pandeglang Tahun 2017



Penghargaan Opini BPK WTP Kabupaten Pandeglang Tahun 2017





Penghargaan sebagai Desa Inspiratif Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dari Kementerian Desa

## UM DESA MENJEMPUT ASA & DEKLARASI

terasi Desa, Program Desa Bebas Narkoba, Program Radio Swara Desa, Majalah Wanua, Pemberian Penghargaan Desa dan Pendamping Desa

Jakarta, 29 Nopember 2018



Penghargaan sebagai Desa Inspiratif Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 dari Kementerian Desa



Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM



Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM Tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM





Penghargaan SAKIP dari Kemenpan dan RB Tahun 2018 ( Mendapat Predikat BB )



Penghargaan SAKIP dari Kemenpan dan RB Tahun 2018 ( Mendapat Predikat BB )



MENERIMA PENGHARGAAN ATAS PENILAIAN  
SAKIP KABUPATEN PANDEGLANG OLEH  
KEMENPAN-RB TAHUN 2019.







Penghargaan Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Pandeglang Tahun 2019



**Kabupaten Pandeglang meraih Penghargaan Innovative Government Award 2020, dengan kategori Sangat Inovatif. Penghargaan diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Republik Indonesia**



**Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020**





**Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan WTP Untuk Keempat Kali**

**Tahun 2019**

**DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2017 - 2020**

<b>N O</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>KEMENTERIAN / LEMBAGA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Kabupaten dengan Investasi Terbaik (Sindo Government Award 2017)	Sindo Weekly	TAHUN 2017
2	Anugerah Pangripta Nusantara untuk kategori Kabupaten terbaik dalam penyusunan RKPD Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017	Kemendagri	TAHUN 2017
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016	BPK RI	TAHUN 2017
4	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Kemenkumham RI	TAHUN 2017
1	Predikat "B" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Kemenpan RB	TAHUN 2018
2	Best Woman Regional Leaders 2018	Obsession media Group	TAHUN 2018
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017	BPK RI	TAHUN 2018
4	Penghargaan Indeks Desa Membangun	Kemendesa PDTT	TAHUN 2018
5	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Kemenkumham RI	TAHUN 2018
1	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Kemenpan RB	TAHUN 2019
2	Peringkat ke 3 Terbaik SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) se- Indonesia	Kemenpan RB	TAHUN 2019
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018	BPK RI	TAHUN 2019
4	Penghargaan Kabupaten Tanggap Bencana	Kemensos RI	TAHUN 2019
5	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Kemenkumham RI	TAHUN 2019

1	Penghargaan Sebagai Daerah yang berpartisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana	BNPB	TAHUN 2020
2	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Kemenpan RB	TAHUN 2020
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020	BPK RI	TAHUN 2020
4	Penghargaan Kabupaten peduli terhadap Hak Asasi Manusia	Kemenkumham RI	TAHUN 2020
5	Predikat "Sangat Inovatif" Innovative Government Award 2020	Kemendagri RI	TAHUN 2020